LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2023

DINAS SOSIAL DIY
Jl. Janti Banguntapan Bantul Yogyakarta
Telp/Fax : (0274) 514932, 563510
Website : http://dinsos.jogjaprov.go.id

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial DIY Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. LKjIP Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2023 diwarnai dengan berbagai tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi. Namun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Dinas Sosial DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026. Proses penyusunan laporan ini membutuhkan kesiapan dan kerja keras dari seluruh jajaran instansi pemerintah terkait, agar dapat menghasilkan sebuah laporan yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara baik kepada publik.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Yogyakarta, Februari 2024

Kepala Dinas Sosial DIY

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DISSOS

ENDANG PATMINTARSIH, SH, M.Si

NIP. 19660404 199303 2 007

Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja Dinas Sosial DIY tahun 2023 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis 1 “Terpenuhinya kebutuhan dasar, perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan perilaku bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)”:

   - Diukur dengan indikator persentase pelayanan rehabilitasi, perlindungan, pemberdayaan dan jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) guna meningkatkan fungsi sosial dalam mencapai kemandirian serta meningkatkan kapasitas dan partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

   - Capaian indikator tersebut didukung oleh kinerja 14 jenis PPKS, yaitu Anak Balita Terlantar, Anak Terlantar, Anak Berhadapan Hukum dan Anak Jalanan, Anak dengan Kedisabilitasan, Penyandang Disabilitas, Gelandangan dan Pengemis, Orang dengan HIV dan AIDS, Lanjut Usia Terlantar, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi, Anak Memerlukan Perlindungan Khusus, Fakir Miskin, Korban Tindak Kekerasan Pekerja Migran Bermasalah Sosial, Korban Bencana Alam, dan Korban Bencana Sosial dengan formulasi perhitungan : % ABT + %AT + %ABH Anjal + %ADK + %PD + %Gepeng + %ODHA + %LUT + %PRSE + % AMPK + % FM + %KTK PMBS + % KBA + % KBS dibagi 14 sasaran penanganan.

   - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 4 program, yaitu Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Program Penanganan Bencana.

   - Target capaian indikator sasaran tahun 2023 sebesar 30,13%; sampai dengan bulan Desember 2023 terealisasi 57,50%. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Presentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 190,84%.

2. Capaian sasaran strategis 2 “Terwujudnya peningkatan kemampuan partsipasi dan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)”:

- Diukur dengan indikator persentase PSKS dan masyarakat sasaran yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial
- Capaian indikator tersebut didukung oleh kinerja 11 PSKS, yaitu Kesetiakawanan, Nilai Pahlawan, Keluarga Pahlawan, Pekerja Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Lemaba Kesejahteraan Sosial, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat, Karang Taruna, Taruna Siaga Bencana, Dunia Usaha, dan Penyuluhan Desa dengan formulasi perhitungan : % Kesetiakawanan + % Nilai Pahlawan + % Keluarga Pahlawan + % PSM + % TKSK + % LKS + %WKSBM + % KT + % Tagana + % DU + % Desa dibagi 11
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kineja 2 program, yaitu Program Pemberdayaan Sosial dan Program Pengelolaan Taman Makan Pahlawan
- Target capaian indikator sasaran tahun 2023 sebesar 25,35%; sampai dengan bulan Desember 2023 terealisasi 25,97%. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Presentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 102,45%

3. Capaian sasaran strategis 3 “Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah” :
   - Diukur dengan indikator capaian Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
   - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
   - Target capaian indikator sasaran tahun 2023 Dinas Sosial DIY telah melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan capaian persentase 93,13% masuk dalam predikat kategori A

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Sosial DIY ke depan, sebagai berikut:

1. Kemiskinan

   Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah penduduk miskin di Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta mencapai 463,63 ribu jiwa atau 11,49 persen pada

September 2022. Jumlah itu naik 0,15 persen atau 8,87 ribu jiwa dibandingkan pada Maret 2023 yang sebesar 11,04 persen. Presentase penduduk miskin DIY lebih besar dari angka rata-rata nasional yang sebesar 9.,57 persen. Garis kemiskinan DIY pada September 2022 meningkat menjadi Rp. 551.342,- bila dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 482.855,- Ketimpangan di DIY mengalami peningkatan pada tahun 2022 ditunjukan dengan Gini Ratio sebesar 0,459. Angkat tersebut meningkat dari tahun 2021 yang sebesar 4,44. Perekonomian DIY selama 2022 tumbuh sebesar 5,15 persen (c-to-c). Kondisi ini turun jika dibandingkan tahun sebelumnya, 5,53 persen pada tahun 2021.

Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI No. 10/HUK/2024 per Januari 2024, warga DIY yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sejumlah 2.132.800 jiwa menurun bila dibandingkan dengan Desember 2023 sebesar 1.997.861 jiwa. Intervensi terhadap fakir miskin sudah banyak dilakukan melalui perlindungan sosial dan rehabilitasi sosial bagi masyarakat miskin yang sudah tidak produktif, dan bagi mereka yang masih produktif diintervensi melalui pemberdayaan sosial dalam bentuk pendampingan dan koordinasi penyaluran BPNT, pendampingan dan koordinasi UEP PKH, dan UEP PKH Graduasi melalui BKK.

2. Perlindungan Anak

Jumlah anak yang mengalami permasalahan kesejahteraan sosial berdasarkan Pemutakhiran Data PPKS dan PSKS Dinas Sosial DIY tahun 2022 meliputi anak-anak yang termasuk kategori anak terlantar sejumlah 5.200 anak dan anak balita terlantar sejumlah 431 anak. Anak dan balita telantar ini merupakan anak yatim piatu yang memiliki keluarga atau kerabat dengan ekonomi yang tidak berkecukupan dan/atau tinggal di dalam keluarga miskin sehingga mengalami hambatan perkembangan dan fungsi sosial. Paradigma lama bahwa penanganan anak terlantar melalui pelayanan dalam panti menjadi solusi pilihan, saat ini tidak lagi relevan seiring dengan bergesernya kebijakan nasional yang menekankan pentingnya pengasuhan berbasis keluarga, bukan berbasis panti/lembaga pengasuhan, maka pengasuhan dalam panti menjadi alternatif terakhir pada penanganan anak terlantar. Peringkat kedua yaitu Anak dengan kedisabilitasan, yang berjumlah 2.012 anak. Jumlah tersebut mengalami kenaikan bila dibandingkan data pada tahun 2021 sebesar 1.971 anak (Pemutakhiran Data PPKS dan PSKS Dinas Sosial DIY, 2022) . Anak dengan Kedisabilitasan atau disebut juga dengan Anak berkebutuhan khusus (ABK)

belum terpenuhi hak-haknya untuk bisa menikmati pendidikan di Sekolah Inklusi. Pada tahun 2012, Pemerintah DIY telah mengesahkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pemenuhan dan Perlindungan terhadap hak-hak Penyandang Disabilitas yang di dalamnya juga mempromosikan pendidikan inklusi. Peraturan ini kemudian diubah dengan Peraturan Daerah DIY nomor 5 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Dinas Sosial DIY telah mengupayakan berbagai bentuk layanan untuk ADK tersebut dalam bentuk pelayanan yang telah dilakukan dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2017-2022) yaitu pengasramaan SLB, Bantuan Sosial Anak dengan Kedisabilitasan melalui LKS.

Selain itu, permasalahan tentang anak berkembang semakin kompleks dengan munculnya Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang jumlahnya mencapai 222 anak, Anak yang Hidup di Jalan sebanyak 132 anak, Anak Korban Tindak Kekerasan dan memerlukan perlindungan khusus sebanyak 25 anak (Pemutakhiran data PPKS dan PSKS Dinas Sosial DIY, 2022). Hal ini memerlukan tindak lanjut perlindungan dan penanganan.

3. Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas yang memerlukan pelayanan kesejahteraan sosial teridentifikasi berjumlah 28.137 orang dan 2.012 anak dengan kedisabilitasan (Pemutakhiran data PPKS dan PSKS Dinas Sosial DIY, 2022). Pada tahun 2012, Pemerintah DIY dan DPRD DIY telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Peraturan ini kemudian diubah dengan Peraturan Daerah DIY nomor 5 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Kebijakan ini telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan mengakomodasi berbagai instrumen internasional yang terkait dengan hak- hak bagi penyandang disabilitas, termasuk di antaranya Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas (UNCRPD) yang mengamanatkan agar Pemda DIY, Pemkab/Kota, dan Masyarakat berkewajiban mewujudkan dan memfasilitasi terwujudnya aksesibilitas penggunaan fasilitas umum, bagi penyandang disabilitas sesuai dengan kewenangan.

Untuk mengimplementasikan berbagai kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang Disabilitas tersebut, Dinas Sosial DIY memfasilitasi Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang

Disabilitas sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 31 Tahun 2013. Dinas Sosial juga memberikan bantuan sosial bekerjasama dengan LKS yang menanganai permasalahan penyandang disabilitas.

Permensos No. 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa ketugasan Provinsi melayani rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti, sehingga pelayanan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial DIY sangat terbatas pada pemenuhan kebutuhan dasar berbasis panti melalui Balai/ UPTD Dinas Sosial DIY. Sejauh ini pelayanan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan di Balai mengarah kepada rehabilitasi sosial dan vokasional, dimana fokusnya memberikan berbagai keterampilan, baik ilmu pengetahuan serta teknologi dalam upaya mengembalikan kemampuan untuk bekerja secara optimal sesuai dengan kemampuan fisiknya.

Rehabilitasi vokasional yang hanya sampai pada tingkat dasar atau menengah sangat sulit diharapkan dapat menciptakan wirausaha baru yang mampu memproduksi barang dan atau jasa yang kompetitif. Faktanya banyak usaha mandiri yang dikelola penyandang disabilitas yang bangkrut, mandeg atau tumbuh sangat lambat. Dukungan dan fasilitasi pemerintah terhadap usaha-usaha yang baru dirintis juga masih terbatas.

4. Penaggulangan Bencana

Daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas utara Gunung Merapi serta batas selatan Samudera Hindia memiliki potensi besar terhadap bencana. Dua kabupatennya bertopografi pegunungan, yaitu di Kabupaten Gunungkidul dengan pegunungan kapur atau merupakan kawasan karts dan di Kabupaten Kulonprogo sebagian merupakan kawasan Pegunungan Menoreh, juga berpotensi lebih besar terhadap kejadian bencana alam. Selain itu Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman sebagai kota tujuan pendidikan mempunyai penduduk dengan latar belakang yang lebih beragam, sehingga berpotensi terhadap kejadian konflik atau bencana sosial.

Korban Bencana alam tercatat sebanyak 21.908 orang dan korban bencana sosial sebanyak 59 keluarga (Pemutakhiran Data PPKS dan PSKS 2022). Penanggulangan bencana yang dilakukan oleh Dinas Sosial DIY meliputi usaha mitigasi penanggulangan bencana, bimbingan, supervisi, konsultasi di daerah rawan bencana, dan bantuan sosial korban bencana serta bantuan kepada

orang terlantar. Pada kejadian Bencana Dinas Sosial DIY mengarahkan sumber daya untuk menangani korban bencana melalui bantuan sosial (logistik) dan melakukan pendampingan sosial terhadap korban bencana. Dinas Sosial melatih Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dan Tenaga Pelopor, serta Difabel Taruna Siaga Bencana (DIFAGANA). Untuk melaksanakan tugas mitigasi dan kesiapsigaan, dibentuk Kampung Siaga Bencana (KSB). Hal-hal tersebut tidak terlepas dari kearifan lokal yang digunakan sebagai dasar tindakan pencegahan, sikap dan praktek hidup hamemayu hayuning bawono serta menjaga keguyuban dan kerukunan dalam menghadapi situasi bencana.

5. Perlindungan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia

Usia Harapan Hidup DIY mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebesar 75,08, menjadi 75,12 di tahun 2023 (BPS, 2023). Meningkatnya Usia Harapan Hidup di DIY, menghasilkan kelompok lanjut usia yang meningkat. Hal ini berimplikasi terhadap penyediaan layanan dalam menjawab kompleksitas permasalahan terkait lansia. Harapanya seluruh lansia di DIY selalu sehat dan produktif. Namun faktanya meskipun usia harapan hidup di DIY tertinggi di tingkat nasional, kondisi kehidupan para lanjut usia masih banyak yang mengalami keterlantaran.

Jumlah lanjut usia DIY berdasarkan data BPS Tahun 2022 sebanyak 604.511 orang, 33.129 orang diantaranya adalah Lanjut Usia telantar (Pemutakhiran Data PPKS dan PSKS Dinas Sosial, 2022). Program-program pelayanan sosial lanjut usia mengarah kepada pemberian jaminan hidup untuk memenuhi kebutuhan pokok dan menjamin kelangsungan hidup lanjut usia. Kebijakan perlindungan dan jaminan sosial merupakan model perlindungan sosial negara-negara yang menganut welfare state yang mampu memberi pelayanan yang luas kepada warganya. Namun kebijakan ini telah dikoreksi di sejumlah negara karena krisis ekonomi berkepanjangan sehingga negara sangat berat untuk membayarkan berbagai insurance yang sudah jatuh tempo, termasuk insurance untuk lanjut usia. Program perlindungan sosial juga masih sangat terbatas coveragenya, sehingga hanya mampu menjangkau sebagian kecil lanjut usia yang seharusnya memenuhi kriteria untuk memperoleh jaminan sosial.

Pelayanan sosial yang dilakukan Dinas Sosial DIY selama kurun waktu lima tahun terakhir meliputi:

a. Pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar dilaksanakan melalui sistem dalam panti dan luar panti. Di DIY terdapat satu Balai yang menangani Werdha yang dikelola oleh Dinas Sosial DIY, yang terdapat pada dua unit, yaitu Budi Luhur, Bantul dan Abiyoso, Sleman.
b. Pelayanan *home care* maupun *day care*, dengan melibatkan lembaga kesejahteraan sosial.

Pelayanan kesejahteraan lanjut usia di luar panti ditujukan kepada lanjut usia atau keluarganya. Selain pemenuhan kebutuhan dasar dan jaminan sosial, juga diberikan bantuan usaha ekonomi produktif bagi lanjut usia yang masih produktif namun seiring dengan kewenangan maka selanjutnya sasaran hanya kepada lanjut usia tidak potensial.

Daftar Isi

Kata Pengantar 2

Ikhtisar Eksekutif 2

Daftar Isi 10

BAB I Pendahuluan.....14

1. Cascading Kinerja dan Struktur Organisasi 14

2. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan.....14

3. Isu-Isu Strategis.....14

4. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran 14

5. Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2022.....14

1.1. Cascading Kinerja dan Struktur Organisasi sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.....14

1.2. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan 16

1.3. Isu-Isu Strategis.....20

1.4. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran.....22

1.5. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022 26

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja.....28

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD 29

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan 30

2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023 31

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....39

2.5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja 42

BAB III Akuntabilitas Kinerja.....44

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2023 44

3.2. Capaian Kinerja Lainnya.....79

3.1. Efisiensi Anggaran 84

3.2. Inovasi 86

1. Open the Gate 86

3.3. Lintas Sektor 90

BAB IV Penutup 94

3.1. Kesimpulan 94

3.2. Langkah Perbaikan Kinerja 94

L A M P I R A N 95

Daftar Tabel

Tabel I. 1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi....22
Tabel I. 2 Sarana-Prasarana....23
Tabel I. 3 Anggaran Tahun 2023....24
Tabel I. 4 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022....26
Tabel II. 1 Sasaran Strategis Dinas Sosial DIY, 2023-2026....29
Tabel II. 2 Strategi dan Arah Kebijakan....30
Tabel II. 3 Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2023....31
Tabel II. 5 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial DIY 2023....39
Tabel II. 6 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Sosial DIY Tahun 2023....41
Tabel III. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja....44
Tabel III. 2 Capaian Kinerja Tahun 2023....44
Tabel III. 3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan....46
Tabel III. 4 Capaian Hasil Penanganan 14 Sasaran PPKS....47
Tabel III. 5 Capaian Program, Kegiatan, dan SubKegiatan terhadap Sasaran 1....48
Tabel III. 6 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan....64
Tabel III. 7 Capaian Hasil Penanganan 14 Sasaran PPKS....65
Tabel III. 8 Capaian Program, Kegiatan, dan SubKegiatan terhadap Sasaran 2....67
Tabel III. 9 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan....72
Tabel III. 10 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023....72
Tabel III. 11 Capaian Program, Kegiatan, dan SubKegiatan terhadap Sasaran 3....73
Tabel III. 12 Realisasi SPM Bidang Sosial Tahun 2023....79
Tabel III. 13 Kontribusi Sasaran Dinas Sosial DIY terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Daerah....80
Tabel III. 14 Kontribusi Program Dinas Sosial DIY terhadap Capaian Program Pemerintah Daerah....82
Tabel III. 15 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2023....84
Tabel III. 16 Inventarisasi Lintas Sektor Dinas Sosial DIY Setda DIY....91

Daftar Gambar

Gambar I. 1 Cascading Kinerja 1 15
Gambar I. 2 Struktur Organisasi 16
Gambar II. 1. Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP 42
Gambar II. 2 Manunggal Raharja 43
Gambar Sasaran 1 60
Gambar Sasaran 2 69
Gambar Inovasi 1 88
Gambar Inovasi 2 89

BAB I Pendahuluan

Bab I berisi:
1. *Cascading Kinerja dan Struktur Organisasi*
2. *Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan*
3. *Isu-Isu Strategis*
4. *Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran*
5. *Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2022*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

1.1. *Cascading Kinerja* dan Struktur Organisasi sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Daerah DIY, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah DIY tahun 2023 – 2026. Dinas Sosial DIY dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar I. 1 Cascading Kinerja 1

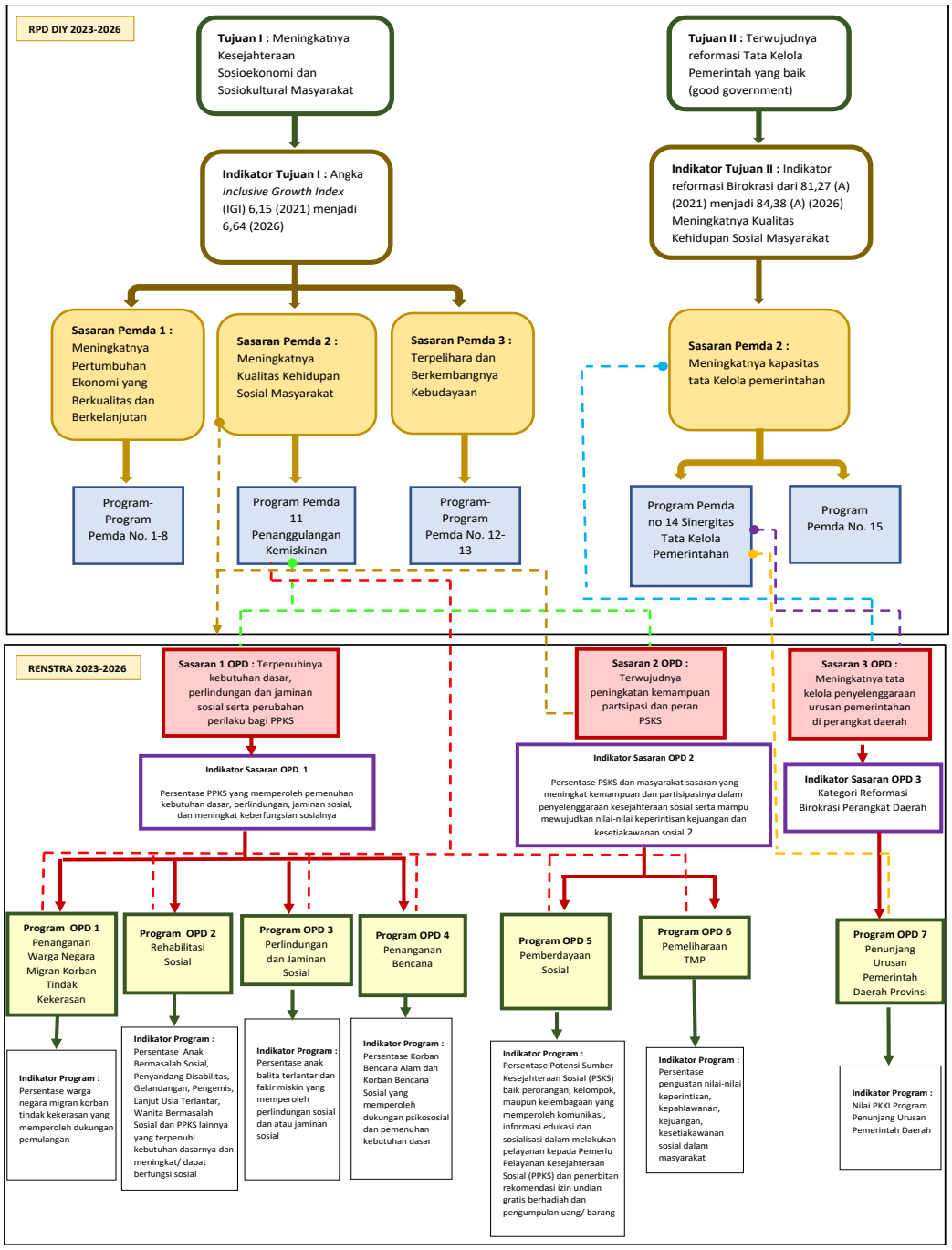

Sumber: RPD 2023-2026, Renstra Dinas Sosial DIY 2023-2026

Gambar I. 2 Struktur Organisasi

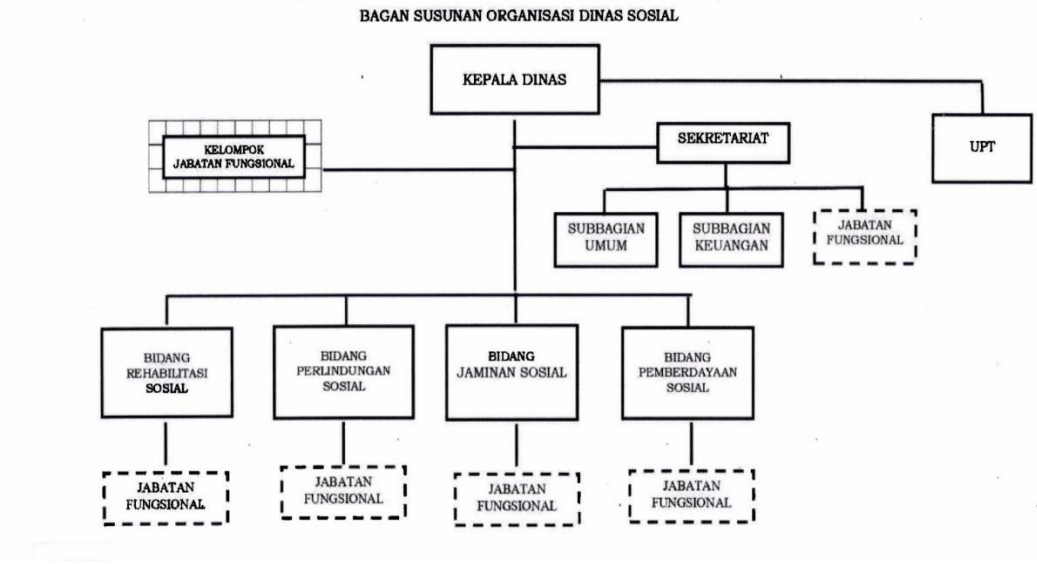

Sumber: Lampiran PERGUB DIY Nomor 106 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial DIY

1.2. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dinas Sosial DIY mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial. Berdasarkan Pergub DIY Nomor 106 Tahun 2022, untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Sosial DIY mempunyai fungsi :

1. penyusunan program kerja dinas;
2. perumusan kebijakan teknis bidang sosial;
3. penyelenggaraan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial;
4. pemberian fasilitasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial Kabupaten/Kota;
5. pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
6. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang sosial;
7. penguatan, pengembangan dan pemanfaatan nilai-nilai, norma dan tradisi luhur dalam penanganan masalah sosial;
8. pengembangan program bidang sosial;
9. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
10. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
11. fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Dinas;
12. fasilitasi penyusunan kebijakan proses bisnis Dinas;

13. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik lingkup Dinas;
14. pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang sosial;
15. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan kabupaten/kota;
16. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
17. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Sesuai Pelaksanaan tugas fungsi Dinas Sosial DIY dibagi habis ke dalam jabatan struktural dan jabatan pelaksana berdasarkan Pergub DIY Nomor 15 tahun 2021 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pergub DIY Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Pergub DIY Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY, serta Peraturan Gubernur DIY Nomor 106 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial DIY, dengan komposisi sebagai berikut:

Peraturan Gubernur DIY Nomor 106 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial dengan komposisi sebagai berikut :					
Jabatan Struktural			**Jabatan Pelaksana**		
1	Kepala Dinas		1	Di Bawah Sekretaris	
2	Sekretaris			1	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
	1	Kepala Subbagian Keuangan		2	Analis Sistem Informasi
	2	Kepala Subbagian Umum	2	Di bawah Kepala Subbagian Keuangan	
3	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial			1	Bendahara
4	Kepala Bidang Perlindungan Sosial			2	Pengadministrasi Keuangan
5	Kepala Bidang Jaminan Sosial			3	Pengelola Gaji
6	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial			4	Pengelola Akuntansi
7	Kepala Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas			5	Verifikator Data Laporan Keuangan
	1	Kepala Subbagian Tata Usaha	3	Di bawah Kepala Subbagian Umum	
	2	Kepala Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas		1	Pengadministrasi Umum
	3	Kepala Seksi Rehabilitasi Medik		2	Pengadministrasi Persuratan

Peraturan Gubernur DIY Nomor 106 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial dengan komposisi sebagai berikut :			
Jabatan Struktural		**Jabatan Pelaksana**	
8	Kepala Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita		3 Pranata Kearsipan
	1 Kepala Subbagian Tata Usaha		4 Analis Sumber Daya Manusia Aparatur
	2 Kepala Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial		5 Teknisi Sarana dan Prasarana
9	Kepala Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras		6 Kustodian Barang Milik Negara
	1 Kepala Subbagian Tata Usaha		7 Pengemudi
	2 Kepala Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Bina Karya	4	Di bawah Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
	3 Kepala Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Bina Laras		1 Pengadministrasi Umum
10	Kepala Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja		2 Analis Rehabilitasi Masalah Sosial
	1 Kepala Subbagian Tata Usaha	5	Di bawah Kepala Bidang Perlindungan Sosial
	2 Kepala Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial		1 Pengadministrasi Umum
11	Kepala Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak		2 Analis Jaminan Sosial
	1 Kepala Subbagian Tata Usaha		3 Analis Penanggulangan Krisis
	2 Kepala Seksi Perlindungan dan Pengembangan Sosial	6	Di bawah Kepala Bidang Jaminan Sosial
12	Kepala Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha		1 Pengadministrasi Umum
	1 Kepala Subbagian Tata Usaha		2 Analis Dampak Sosial
	2 Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial		3 Penyuluh Penanganan Masalah Sosial
13	Pekerja Sosial	7	Di bawah Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
14	Penyuluh Sosial		1 Pengadministrasi Umum
15	Perencana		2 Analis Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Masalah Sosial
16	Penggerak Swadaya Masyarakat		3 Analis Pelayanan Sosial
17	Perawat		4 Pranata Taman Makam Pahlawan
18	Instruktur	8	Di bawah Kepala Tata Usaha Baial
19	Nutrisionis		1 Pengadministrasi Persuratan
20	Fisioterapis		2 Pranata Kearsipan
			3 Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
			4 Analis Sumber Daya Manusia Aparatur
			5 Kustodian Barang Milik Negara

Peraturan Gubernur DIY Nomor 106 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial dengan komposisi sebagai berikut :	
Jabatan Struktural	**Jabatan Pelaksana**
	6 Pengelola Asrama 7 Bendahara 8 Pengadministrasi Keuangan 9 Pengelola Gaji 10 Pengelola Akuntansi 11 Verifikator Data Laporan Keuangan 12 Teknisi Sarana dan Prasarana 13 Pengolah Makanan 9 Di bawah Kepala Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas 1 Pengadministrasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat 2 Penyuluh Penanganan Masalah Sosial 10 Di bawah Kepala Seksi Rehabilitasi Medik Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas 1 Pengelola Pelayanan Kesehatan 2 Penyuluh Penanganan Masalah Sosial 11 Di bawah Kepala Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita 1 Penyuluh Penanganan Masalah Sosial 12 Di bawah Kepala Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Bina Karya Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras 1 Penyuluh Penanganan Masalah Sosial 2 Pengelola Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial 13 Di bawah Kepala Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Bina Laras Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras 1 Penyuluh Penanganan Masalah Sosial 2 Pengelola Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial

Peraturan Gubernur DIY Nomor 106 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial dengan komposisi sebagai berikut :	
Jabatan Struktural	**Jabatan Pelaksana**
	14 Di bawah Kepala Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja 1 Penyuluh Penanganan Masalah Sosial 15 Di bawah Kepala Seksi Perlindungan dan Pengembangan Sosial Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak 1 Penyuluh Penanganan Masalah Sosial 2 Pengelola Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial 16 Di bawah Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha 1 Penyuluh Penanganan Masalah Sosial 2 Pengelola Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial

1.3. Isu-Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung pada sejauh mana institusi tersebut mampu menemukenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Dinas Sosial DIY merupakan OPD yang menangani permasalahan sosial, dengan demikian isu strategis banyak berkaitan dengan permasalahan sosial, antara lain sebagai berikut:

1. Kemiskinan

Kemiskinan saling terkait dengan munculnya permasalahan sosial lainnya baik sebagai penyebab maupun sebagai dampak. Kemiskian merupakah isu krusial yang harus ditangani dengan berbagai program dan kegiatan sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan sosial masyarkat. Dengan menjadikan kemiskinan sebagai isu utama, intervensi permasalahan kesejahteraan sosial diharapkan dapat menimbulkan efek domino dalam mengatasi permasalahan sosial lainnya.

2. Anak Terlantar

Anak sebagai generasi penerus pembangunan di masa depan membutuhkan perlindungan dari berbagai masalah sosial yang dapat menimpa mereka. Isu ketelantaran anak berkembang menjadi permasalahan sosial yang kompleks di DIY

dan memerlukan penanganan. Peningkatan kriminalitas terkait anak baik sebagai korban bahkan menjadi pelaku tindak kriminal menuntut kehadiran pemerintah salah satunya melalui Dinas Sosial DIY. Berdasarkan hal tersebut, kesejahteraan anak menjadi salah satu prioritas Dinas Sosial DIY untuk wujudkan.

3. Penyandang Disabilitas dan Anak dengan Kedisabilitasan

Perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas masih belum terlaksana secara ideal. Dinas Sosial DIY memiliki kewajiban untuk mengupayakan perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas baik dalam hal kebijakan maupun intervensi langsung pelayanan kesejahteraan sosial. Terlebih di masa pandemi *Covid-19*, penyandang disabilitas perlu mendapatkan prioritas untuk memperoleh perlindungan dan jaminan sosial dari pemerintah agar memiliki akses yang sama sebagai warga masyarakat.

4. Kebencanaan

Daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas utara adalah Gunung Merapi serta batas selatan adalah Laut Jawa, memiliki potensi yang lebih besar terhadap kejadian bencana alam. Dua kabupatennya bertopografi pegunungan, yaitu di Kabupaten Gunungkidul dengan pegunungan kapur atau merupakan kawasan Karts, dan di Kabupaten Kulonprogo sebagian merupakan kawasan Pegunungan Menoreh, juga berpotensi lebih besar terhadap kejadian bencana alam. Selain itu Kota Yogya dan kabupaten Sleman sebagai Kota tujuan pendidikan mempunyai penduduk dengan latar belakang yang lebih beragam, sehingga berpotensi terhadap kejadian konflik atau bencana sosial. Dibutuhkan langka penanggulangan bencana mulai dari mitigasi, tanggap darurat hingga pasca bencana yang sistematis sebagai bentuk perlindungan pemerintah DIY melalui Dinas Sosial DIY untuk warga masyarakat.

5. Lanjut Usia Terlantar

Usia harapan hidup yang tinggi di DIY menuntut pemerintah untuk siap memberikan jaminan kesejahteraan bagi warga lanjut usia denagn berbagai program. Selama ini program-program pelayanan sosial lanjut usia masih mengarah kepada pemberian jaminan hidup untuk memenuhi kebutuhan pokok dan menjamin kelangsungan hidup lanjut usia terlantar saja. Hingga saat ini DIY belum mempunyai Pelayanan yang lebih luas dalam rangka menjamin hari tua yang mandiri, aman, tentram dan bahagia. Kehadiran Dinas Sosial diperlukan untuk mengupayakan kesejahteraan bagi lanjut usia dan melaksanakan regualasi tentang perlindungan lanjut usia di DIY.

1.4. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I. 1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi						Pegawai yang ada							Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi				Jml		Kualifikasi						Laki	Perempuan
1	2	3	4				5		6						7	8
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	D2	SMA	SLTP	SD		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	1				1	1								1
B.	Jabatan Administrasi															
	1. Administrator	11		11			10	7	3						7	3
	2. Pengawas	25		25			14	3	11						6	8
	3. Pelaksana	239		103	136		111	2	32	25	-	46	3	3	51	60
C.	Jabatan Fungsional	222		117	96	9	60	7	23	23	3	4			24	36
	Jumlah	498	1	256	232	9	196	20	69	48	3	50	3	3	88	108

Sumber: Data Kepegawaian Dinas Sosial DIY Tahun 2023

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Dinas Sosial DIY relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 69 orang (35,20%) , disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 20 orang (10,20%), D3 sebanyak 48 orang (24,49%), D2 sebanyak 3 orang (1,53%), SLTA 50 orang (25,51%), SLTP sebanyak 3 orang (1,53%), dan SD sebanyak 3 orang (1,53%). Komposisi pegawai perempuan sedikit lebih banyak dibanding pegawai laki-laki; bahkan untuk jabatan struktural pun lebih banyak dijabat perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 302 orang, terdiri dari 1 orang pejabat administrator, 11 pejabat pengawas, 128 pejabat pelaksana administratif serta 162 pejabat fungsional.

Tabel I. 2 Sarana-Prasarana

No.	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset*
1	**TANAH**	**34**	18.708.779.490,00
	TANAH	34	18.708.779.490,00
2	**PERALATAN DAN MESIN**	**16.893**	**33.226.490.829,06**
	ALAT BESAR	65	1.667.616.400,00
	ALAT ANGKUTAN	127	6.735.686.354,31
	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	505	898.371.720,00
	ALAT PERTANIAN	109	224.510.444,00
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	13.410	13.726.358.842,12
	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	401	1.600.603.309,87
	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	1.317	4.442.009.924,16
	ALAT LABORATORIUM	208	367.848.300,00
	ALAT PERSENJATAAN	34	23.740.000,00
	KOMPUTER	643	3.461.487.322,66
	ALAT EKSPLORASI	0	0
	ALAT PENGEBORAN	0	0
	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0	0
	ALAT BANTU EKSPLORASI	0	0
	ALAT KESELAMATAN KERJA	0	0
	ALAT PERAGA	0	0
	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0	0
	RAMBU – RAMBU	0	0
	PERALATAN OLAH RAGA	74	118.258.212,00
3	**GEDUNG DAN BANGUNAN**	**318**	**109.608.206.719,00**
	BANGUNAN GEDUNG	294	108.553.464.166,00
	MONUMEN	19	118.348.623,00
	BANGUNAN MENARA	0	0
	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	5	936.393.930,00
4	**JALAN,IRIGASI DAN JARINGAN**	**63**	**2.802.112.964,94**
	JALAN DAN JEMBATAN	3	340.668.000,00
	BANGUNAN AIR	26	1.812.053.964,94
	INSTALASI	11	276.820.756,00
	JARINGAN	23	371.570.244,00
5	**ASET TETAP LAINNYA**	**1.595**	**637.727.882,00**
	BAHAN PERPUSTAKAAN	1.311	102.263.242,00
	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRA	284	535.464.640,00
	HEWAN	0	0
	BIOTA PERAIRAN	0	0
	TANAMAN	0	0

No.	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset*
	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0	0
	ASET TETAP DALAM RENOVASI	0	0
6	**KOSTRUKSI DALAM PENGERJAAN**	**11**	**366.905.500,00**
	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	11	366.905500,00
7	**ASET LAINYA**	24	**1.039.549.650,00**
	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0	0
	ASET TIDAK BERWUJUD	4	225.815.150,00
	ASET LAIN-LAIN	20	813.734.500,00
TOTAL		**18.938**	**166.429.773.035,00**

Sumber: Data Neraca Dinas Sosial DIY 31 Desember 2023 (Unaudited)
**Nilai aset belum memperhitungkan penyusutan di tahun 2023*

Kendaraan operasional Dinas Sosial DIY (induk dan balai) terdiri dari yakni 8 (delapan) unit kendaraan dinas jabatan, 26 (dua puluh enam) unit kendaraan operasional, 4 (empat) unit kendaraan roda tiga 3 (tiga) dan 65 (enam puluh lima) unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang baca, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal komputer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1 : 1. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai. Hanya saja sebanyak 80 % dari komputer/laptop yang ada diproduksi Tahun 2000 awal yang spesifikasinya sudah jauh tertinggal dengan kondisi saat ini sehingga tidak mendukung tuntutan pekerjaan yang 90 % berbasis IT.

Tabel I. 3 Anggaran Tahun 2023

Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
4			**PENDAPATAN DAERAH**			
4	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**Rp604.200.000**	**Rp544.200.000**	**(Rp60.000.000)**
4	1	02	Retribusi Daerah	Rp604.200.000	Rp544.200.000	(Rp60.000.000
			Jumlah Pendapatan	**Rp604.200.000**	**Rp544.200.000**	**(Rp60.000.000)**
5			**BELANJA DAERAH**			

Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
5	**1**		**BELANJA OPERASI**	**Rp91.633.981.153**	**Rp89.715.435.229**	**(1.918.545.924)**
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp40.931.954.233	Rp38.881.275.545	(2.050.678.688)
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp47.554.526.920	Rp47.776.059.684	Rp221.532.764
5	1	05	Belanja Hibah	Rp817.500.000	Rp817.500.000	-
5	1	06	Belanja Bantuan Sosial	Rp2.330.000.000	Rp2.240.600.000	(89.400.000)
5	**2**		**BELANJA MODAL**	**Rp1.748.100.720**	**Rp1.864.870.620**	116.769.900
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp1.306.023.600	Rp1.422.793.500	116.769.900
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp441.569.620	Rp441.569.620	-
5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp507.500	Rp507.500	-
			Jumlah Belanja	**Rp93.382.081.873**	**Rp91.580.305.849**	**(Rp1.801.776.024)**
			Total Surplus/(Defisit)	**(Rp92.777.881.873)**	**(Rp91.580.305.849)**	**(Rp1.197.576.024)**
6			**PEMBIAYAAN DAERAH**			
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**Rp0**	**Rp0**	
			Jumlah Pengeluarah Pembiayaan	**Rp0**	**Rp0**	
			Pembiayaan Neto	**Rp0**	**Rp0**	

Sumber data: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Sosial DIY Tahun 2023

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Sosial DIY berasal dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dana Keistimewaan. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2023 Anggaran Dinas Sosial DIY semula Rp93.382.081.873 dan mengalami perubahan menjadi Rp91.580.305.849 atau berkurang Rp1.801.776.024.

Perubahan anggaran Tahun 2023 merupakan cerminan dukungan Dinas Sosial DIY dalam bentuk *Refocusing* dan realokasi anggaran.

1.5. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022

Tabel I. 4 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
	Surat Inspektur DIY Nomor : 700/01055 tanggal 14 Maret 2023, perihal Laporan Hasil Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah pada Dinas Sosial DIY Tahun 2022 Rekomendasi : 1. Menerapkan manajemen kinerja berkelanjutan meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelapiran kinerja, dan evaluasi atas kinerja internal sehingga praktik baik budaya kinerja yang telah dilakukan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan. 2. Meningkatkan koordinasi internal serta kolaborasi dengan perangkat daerah terkait dalam rangka pencapaian sasaran strategis Dinas Sosial DIY, yaitu : terpenuhinya kebutuhan dasar, perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan perilaku bagi PMKS dan terwujudnya peningkatan kemampuan, partisipasi dan peran potensi sumber kesejahteraan sosial. 3. Melakukan Reviu internal lebih intensif dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Sosial DIY supaya menghasilkan laporan yang substansi dan redaksionalnya sesuai dengan pedoman penyusunan.	Menindak lanjuti Laporan Hasil Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah pada Dinas Sosial DIY Tahun 2022, Dinas Sosial DIY telah : 1. Dinas Sosial DIY berupaya memberikan pelayanan dengan lebih baik dari waktu ke waktu. Manajemen kinerja yang lebih baik dan lebih komprehensif telah membawa Dinas Sosial DIY pada pencapaian kategori Pelayanan Prima sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dan pencapaian nilai Reformasi Birokrasi terjadi peningkatan signifikan dari tahun 2022 sebesar 83,85 menjadi 93,13 pada tahun 2023. Pembangunan Zona Integritas sebagai wujud pelaksanaan dari Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan, maka pada 2023 Dinas Sosial DIY telah memulai dengan melakukan pencanangan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). 2. Meningkatkan Koordinasi internal serta kolaborasi dengan OPD terkait dalam rangka pencapaian sasaran strategis. Sasaran strategis Dinas Sosial DIY terkait terpenuhinya kebutuhan dasar, perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan perilaku bagi PMKS dan terwujudnya peningkatan kemampuan, partisipasi dan peran potensi sumber kesejahteraan sosial, pada tahun 2023 tercapai dengan melampaui target. Koordinasi internal dan

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
		kolaborasi dengan pihak eksternal dilakukan dengan melibatkan semua Bidang, Balai, Mitra Dinas, dan *Stakeholder* terkait, sehingga strategi pencapaian dapat dirumuskan dan dilakukan. 3. Reviu internal dalam rangka penyusunan LKjIP agar sesuai pedoman penyusunan dilakukan secara berlapis mulai dari Sekertaris dan naik ke Kepala Dinas. Penyusunan LKjIP juga telah disesuaikan dengan pedoman yang ada dan selalu dikomunikasikan dengan Mitra pengampu urusan sosial pada Biro Organisasi Setda DIY.

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab II berisi:

1. *Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD*
2. *Strategi dan Arah Kebijakan*
3. *Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023*
4. *Perjanjian Kinerja Tahun 2023*
5. *Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD*

Tahun 2023 merupakan tahun pelaksanaan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 -2026 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2026. Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan amanat dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2023 diwarnai agenda perubahan baik melalaui mekanisme perubahan dana keistimewaan maupun perubahan APBD. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan menyusun reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Pada dasarnya perubahan anggaran tidak mengubah target kinerja pada level sasaran Perangkat Daerah dan program Perangkat daerah, namun mengubah pada tataran target kinerja output dalam sub kegiatan. Perubahan anggaran dilakukan sebagai bentuk konsolidasi fiskal dengan mengedepankan pencapaian target kinerja Perangkat Daerah. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Dinas Sosial DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPD DIY Tahun 2023-2026.

Renstra Dinas Sosial DIY yang merupakan penjabaran operasional RPD DIY Tahun 2023-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2023. Renstra ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai *cascade* kinerja, Dinas Sosial DIY mendukung pencapaian sasaran Pemda DIY pada sasaran meningkatnya derajat ekonomi masyarakat. Terkait hal tersebut, tujuan jangka menengah Dinas Sosial DIY selama lima tahun adalah :

"Meningkatkan kualitas pelayanan rehabilitasi, perlindungan, pemberdayaan dan jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) guna meningkatkan fungsi sosial dalam mencapai kemandirian serta meningkatkan kapasitas dan partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial."

Adapun sasaran Dinas Sosial DIY dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

Tabel II. 1 Sasaran Strategis Dinas Sosial DIY, 2023-2026

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN				Target Akhir Renstra
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1.	Terpenuhinya kebutuhan dasar, perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan perilaku bagi PPKS	Persentase PPKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dan meningkat keberfungsian sosialnya	%	30,13	30,22	30,28	30,34	30,34
2.	Terwujudnya peningkatan kemampuan partsipasi dan peran PSKS	Persentase PSKS dan masyarakat sasaran yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial	%	25,35	25,64	25,64	25,64	25,64
3.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	%	A	A	A	A	A

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II. 2 Strategi dan Arah Kebijakan

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Terpenuhinya kebutuhan dasar, perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan perilaku bagi PPKS	Penguatan kapasitas pelayanan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Memperluas jejaring dan meningkatkan kinerja pelayanan
			Membangun sinergi lintas mitra yang terkait dalam pemenuhan hak-hak penyandang masalah kesejahteraan sosial
		Optimalisasi mitigasi bencana dan pemetaan daerah rawan bencana	Menyiapkan kesiapsiagaan masyarakat (pembentukan KSB, sarasehan keserasian sosial) dan perluasan jangkauan pelayanan oleh petugas perlindungan sosial (tagana, tenaga pelopor perdamaian, tim kampung siaga bencana, difagana)
		Meningkatkan kualitas perlindungan dan pemenuhan hak-hak lansia	Promosi perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi lansia
		Meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat miskin	Promosi kesejahteraan sosial melalui media penyuluhan dan membuka akses bagi warga miskin
2.	Terwujudnya peningkatan kemampuan, partisipasi dan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Optimalisasi peran PSKS dalam pelayanan kesejahteraan sosial	Peningkatan kapasitas PSKS dan peningkatan nilai-nilai Kepahlawanan, keperintisan, serta kesetiakawanan sosial melalui edukasi kesejahteraan sosial
3.	Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Meningkatkan layanan bagi masyarakat dengan mengedepankan transparansi, keterbukaan informasi, dan efisien
			Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan tepat waktu dalam pekerjaan dan pelayanan masyarakat

2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Dinas Sosial DIY tahun 2023 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut:

Tabel II. 3 Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2023

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Sasaran 1 : Terpenuhinya kebutuhan dasar, perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan perilaku bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	**PROGRAM REHABILITAS SOSIAL**	**24.379.064.620**	**24.399.778.820**	**20.714.200**
	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Dalam Panti	**8.004.058.300**	**7.978.678.300**	**(25.380.000)**
	Penyedia Permakanan	4.233.401.500	4.233.401.500	-
	Penyedia Sandang	1.037.130.500	1.037.130.500	-
	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	340.294.500	340.294.500	-
	Penyediaan Alat Bantu	7.482.000	7.482.000	-
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	610.882.100	610.882.100	-
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	1.000.450.200	1.000.450.200	-
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	581.141.100	581.141.100	-
	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	2.100.000	2.100.000	-
	Akses ke Layanan Pendidikan Dan Kesehatab Dasar	106.432.000	106.432.000	-
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	8.400.000	8.400.000	-
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	3.900.000	3.900.000	-

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	72.444.400	47.064.400	(25.380.000)
	Rehabilitas Sosial Dasar Anak Terlantar Di Dalam Panti	**3.139.862.300**	**3.137.214.300**	**(2.648.000)**
	Pengasuhan	9.030.000	9.030.000	-
	Penyediaan Makanan	1.259.032.100	1.259.032.100	-
	Penyediaan Sandang	346.494.400	346.494.400	-
	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	204.072.900	204.072.900	-
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	172.123.200	172.123.200	-
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual, dan Sosial	265.942.900	265.942.900	-
	Pemberian Aktivitas Hidup Sehari-Hari	39.520.300	39.520.300	-
	Fasilitas Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	2.000.000	2.000.000	-
	Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	690.771.300	690.771.300	-
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	6.000.000	6.000.000	-
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	43.724.400	42.124.400	(1.600.000)
	Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Pengganti	2.000.000	2.000.000	-
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitas Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	99.150.800	98.102.800	(1.048.000)
	Rehabilitas Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Dalam Panti	**4.934.505.300**	**5.026.180.500**	**91.675.200**

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Penyediaan Permakanan	3.235.593.600	3.235.593.600	-
	Penyediaan Sandang	395.566.800	493.542.000	97.975.200
	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	16.746.200	16.746.200	-
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	259.701.600	268.401.600	8.700.000
	Pemberian Bimbingan, Fisik, Menatl, Spritual, dan Sosial	675.940.100	675.940.100	-
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	232.157.000	232.157.000	-
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	14.400.000	14.400.000	-
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	4.320.000	4.320.000	-
	Pemulasaran	100.080.000	85.080.000	(15.000.000)
	Rehabilitas Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	**982.763.300**	**982.763.300**	-
	Penyediaan Permakanan	408.680.000	408.680.000	-
	Penyediaan Sandang	99.812.100	99.812.100	-
	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	32.959.200	32.959.200	-
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	14.037.800	14.037.800	-
	Pemberian Bimbingan, Fisik, Menatl, Spritual, dan Sosial	124.333.500	124.333.500	-
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	25.200.000	25.200.000	-
	Pemberian Bimbinngan Keterampilan Dasar	240.440.700	240.440.700	-
	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	1.000.000	1.000.000	-

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	14.400.000	14.400.000	-
	Pemulangan ke Daerah Asal	4.800.000	4.800.000	-
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di Dalam Panti	17.100.000	17.100.000	-
	Rehabilitas Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Dan NAPZA Di Dalam Panti	**7.317.875.420**	**7.274.942.420**	**(42.933.000)**
	Penyediaan Permakanan	2.777.075.300	2.685.825.300	(91.250.000)
	Penyediaan Sandang	601.901.500	664.717.500	62.816.000
	Penyediaan Asrama.Wisma yang Mudah Diakses	440.090.500	440.090.500	-
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	571.278.000	568.854.000	(2.424.000)
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	1.316.532.920	1.316.532.920	-
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	336.071.000	336.071.000	-
	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	954.819.000	954.819.000	-
	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	13.020.000	13.020.000	-
	Pemulangan ke Daerah Asal	223.314.800	223.314.800	-
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	83.772.400	71.697.400	(12.075.000)

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	**20.000.000**	**20.000.000**	**-**
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	**20.000.000**	**20.000.000**	**-**
	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	20.000.000	20.000.000	-
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	**1.718.308.200**	**1.607.072.200**	**(111.236.000)**
	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	**153.407.600**	**131.571.600**	**(21.836.000)**
	Pengangkatan Anak antar WNI	137.827.600	130.639.600	(7.188.000)
	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	15.580.000	932.000	(14.648.000)
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	**1.564.900.600**	**1.475.500.600**	**(89.400.000)**
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.201.586.700	1.112.186.700	(89.400.000)
	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	363.313.900	363.313.900	-
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	**2.079.884.800**	**2.079.884.800**	**-**
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	**2.079.884.800**	**2.079.884.800**	**-**
	Penyediaan Permakanan	257.477.500	257.477.500	-
	Penyediaan Sandang	65.130.000	65.130.000	-
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	59.141.500	59.141.500	-

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	127.225.000	127.225.000	-
	Pelayanan Dukungan Psikososial	1.570.910.800	1.570.910.800	-
	TOTAL ANGGARAN SASARAN 1	**28.197.257.620**	**28.106.735.820**	**90.521.800**
Sasaran 2 : Terwujudnya peningkatan kemampuan partsipasi dan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**4.307.468.300**	**4.306.668.300**	**(800.000)**
	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraaan Sosial Provinsi	4.307.468.300	4.306.668.300	(800.000)
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	2.436.953.400	2.436.953.400	-
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	1.053.985.500	1.053.985.500	-
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	816.529.400	815.729.400	(800.000)
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	**606.660.000**	**606.660.000**	-
	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	**606.660.000**	**606.660.000**	-
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	606.660.000	606.660.000	-
	TOTAL ANGGARAN SASARAN 2	**4.914.128.300**	**4.913.328.300**	**(800.000)**
Sasaran 3 : Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**56.026.066.953**	**54.280.547.865**	**(1.745.519.088)**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**69.893.700**	**69.893.700**	-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31.693.700	31.693.700	-

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	16.000.000	16.000.000	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.200.000	22.200.000	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**40.912.082.233**	**38.859.603.545**	**(2.052.478.688)**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	40.647.374.233	38.596.695.545	(2.050.678.688)
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	207.780.000	207.780.000	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.669.900	9.069.900	(600.000)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	47.258.100	46.058.100	(1.200.000)
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**86.400.000**	**86.400.000**	-
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	86.400.000	86.400.000	-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**48.660.200**	**39.660.200**	**(9.000.000)**
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	48.660.200	39.660.200	(9.000.000)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**1.584.738.400**	**1.568.756.400**	**(15.982.000)**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	139.253.500	139.253.500	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	219.511.900	219.511.900	-
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	666.427.400	676.547.400	**10.120.000**
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.707.000	16.707.000	-
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	126.516.800	126.516.800	-

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	16.515.600	16.515.600	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	385.419.000	359.317.000	26.102.000
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	31.094.200	31.094.200	-
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**1.468.967.220**	**1.506.720.820**	**37.753.600**
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	472.712.100	510.465.700	**37.753.600**
	Pengadaan Mebel	119.283.200	119.283.200	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	435.402.300	435.402.300	-
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	441.569.620	441.569.620	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**9.462.782.800**	**9.380.119.800**	**(82.663.000)**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.580.000	14.580.000	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.291.704.000	1.229.041.000	- 62.663.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.156.498.800	8.136.498.800	- 20.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**2.392.542.400**	**2.769.393.400**	**376.851.000**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	**1.260.521.100**	**1.260.521.100**	-
	Pemeliharaan Mebel	4.110.000	4.110.000	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	216.287.500	286.287.500	70.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	459.979.000	569.095.000	109.116.000

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	451.644.800	649.379.800	197.735.000
	TOTAL ANGGARAN SASARAN 3	**56.026.066.953**	**54.280.547.865**	**(1.745.519.088)**

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial DIY Tahun 2023

Selain yang sudah di sampaikan dalam tabel II.3, Dinas Sosial DIY juga mengampu Program Penyelengaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan, Kegiatan Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman, Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan dengan anggaran Rp 4.181.193.864 dan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Kegiatan Peningkatan Budaya Pemerintahan, Sub Kegiatan Implementasi Budaya Pemerintahan DIY dengan anggaran sebesar Rp 100.000.000.

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial DIY yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Gubernur DIY sebagai berikut:

Tabel II. 4 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial DIY 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Terpenuhinya kebutuhan dasar, perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan perilaku bagi PPKS	Persentase PPKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dan meningkat keberfungsian sosialnya	%	30,13	Triwulan I	6,66
					Triwulan II	11,85
					Triwulan III	16,84
					Triwulan IV	30,13
2.	Terwujudnya peningkatan	Persentase PSKS dan masyarakat sasaran	%	25,35	Triwulan I	2,10
					Triwulan II	13,19

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
	kemampuan partisipasi dan peran PSKS	yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial			Triwulan III	15,82
					Triwulan IV	25,35
3.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	A	Triwulan I	A
					Triwulan II	A
					Triwulan III	A
					Triwulan IV	A*)

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program RPD	Anggaran
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi (APBD)	Rp. 45.680.899.853,-
1.	Program Pemberdayaan Sosial (APBD)	Rp. 4.307.468.300,-
2.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan (APBD)	Rp. 20.000.000,-
3.	Program Rehabilitasi Sosial (APBD)	Rp. 7.129.508.800,-
4.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial (APBD)	Rp. 1.718.308.200,-
5.	Program Penanganan Bencana (APBD)	Rp. 2.079.884.800,-
6.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (APBD)	Rp. 606.660.000,-
7.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dais)	Rp. 4.244.629.000,-
	Jumlah Anggaran	Rp. 61.542.729.953,-

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV.

Pada tahun 2023, Dinas Sosial DIY melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Reviu dilakukan karena adanya perubahan anggaran *ke*giatan dan telah

ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2023. Perjanjian Kinerja Reviu Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel II. 5 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Sosial DIY Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Terpenuhinya kebutuhan dasar, perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan perilaku bagi PPKS	Persentase PPKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dan meningkat keberfungsian sosialnya	%	30,13	Triwulan I	6,66
					Triwulan II	11,85
					Triwulan III	16,84
					Triwulan IV	30,13
2.	Terwujudnya peningkatan kemampuan partisipasi dan peran PSKS	Persentase PSKS dan masyarakat sasaran yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial	%	25,35	Triwulan I	2,10
					Triwulan II	13,19
					Triwulan III	15,82
					Triwulan IV	25,35
3.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	A	Triwulan I	A
					Triwulan II	A
					Triwulan III	A
					Triwulan IV	A*)

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program RPD	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi (APBD)	Rp. 43.593.319.165,-
2.	Program Pemberdayaan Sosial (APBD)	Rp. 4.306.668.300,-

No	Program RPD	Anggaran
3.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan (APBD)	Rp. 20.000.000,-
4.	Program Rehabilitasi Sosial (APBD)	Rp. 7.089.405.800,-
5.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial (APBD)	Rp. 1.607.072.200,-
6.	Program Penanganan Bencana (APBD)	Rp. 2.079.884.800,-
7.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (APBD)	Rp. 606.660.000,-
8.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dais)	Rp. 4.181.193.864,-
9.	Program Penyelenggaran Keistimewaan Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan (Dais)	Rp. 98.500.000,-
	Jumlah Anggaran	Rp. 63.582.704.129,-

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV.

2.5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

1. Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah DIY adalah aplikasi sengguh.jogjaprov.go.id yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD.

Gambar II. 1. Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP

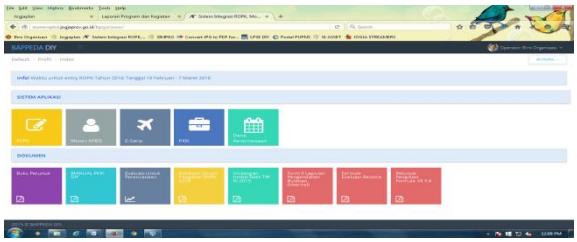

Sumber:http://sengguh.jogjaprov.go.id/

2. **Manunggal Raharja** merupakan akronim dari **MAN**ajemen Validasi **UNG**gul Berbasis Di**G**it**AL** dengan **R**umah Dat**A** Seja**H**ter**A** Masya**R**akat Jog**JA.** Manunggal

Raharja, dimaksudkan untuk menjawab kebutuhan penting terkait masalah ketidakvalidan data yang menyebabkan ketidaktepatan sasaran pelayanan kesejahteraan sosial. Manunggal Raharja merupakan upaya perbaikan validasi dengan membangun sinergi lintas stakeholder yang memiliki peran vital dalam pengelolaan data kependudukan melalui sebuah kebijakan. Merespon perubahan kebijakan berbagi pakai data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari pemerintah pusat, mulai tahun 2022 Pemerintah Daerah DIY berupaya untuk mengelola DTKS wilayah dalam rangka melaksanakan mandat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Yaitu pengelolaan data fakir miskin cakupan wilayah provinsi. Secara teknis upaya ini dilakukan oleh Dinas Sosial DIY dengan mengumpulkan data-data hasil verifikasi DTKS yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, mengakomodir usulan-usulan dari masyarakat yang belum masuk dalam DTKS serta melakukan pemeringkatan kesejahteraan. Dengan optimalisasi kewenangan ini, Pemerintah Provinsi dapat berkontribusi lebih nyata dalam upaya monitoring dan evaluasi pengelolaan DTKS di wilayah DIY yang berdasarkan Permensos Nomor 3 Tahun 2021 kewenangan verifikasinya ada di Pemerintah Kabupaten/Kota.

Gambar II. 2 Manunggal Raharja

Sumber:http://manunggalraharja.jogjaprov.go.id/

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Bab III berisi :
1. *Capaian Kinerja Tahun 2023*
2. Capaian Kinerja Lainnya
3. *Efisiensi Anggaran*
4. *Inovasi*
5. *Lintas Sektor*

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2023

Dinas Sosial DIY telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Dinas Sosial DIY dengan Bapak Gubernur DIY tahun 2023. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 ≤ 100	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4.	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

❖ *Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017*

Tabel III. 2 Capaian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2021	CAPAIAN 2022	TAHUN 2023				TARGET AKHIR RPD
						TARGET	REALI SASI	PERSEN TASE	KRITERIA/ KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Terpenuhinya kebutuhan dasar, perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan perilaku bagi PPKS	Indikator: Persentase PPKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dan meningkat keberfungsian sosialnya Meta Indikator: Rata-rata persentase penanganan pada 14 jenis PPKS target pelayanan Formulasi Perhitungan : %ABT + %AT + %ABH Anjal + %ADK + %PD + %Gepeng + %ODHA +	%	n/a	n/a	30,13	57,5 (%14 pelayanan PPKS/14* 100)	190,84 (57,5/30,13*100)	Sangat Baik	30,34

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2021	CAPAIAN 2022	TAHUN 2023				TARGET AKHIR RPD
						TARGET	REALI SASI	PERSEN TASE	KRITERIA/ KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		%LUT + %PRSE + % AMPK + % FM + %KTK PMBS + %KBA + % KBS dibagi 14 sasaran penanganan PPKS								
2	Terwujudnya peningkatan kemampuan partsipasi dan peran PSKS	Indikator: Persentase PSKS dan masyarakat sasaran yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial Meta Indikator: Rata-rata persentase pelayanan pada 11 jenis target sasaran termasuk PSKS Formulasi Perhitungan : %Kesetiakawanan + %Nilai Pahlawan + %Keluarga Pahlawan + %PSM + %TKSK + %LKS + %WKSBM + %KT + %Tagana + %DU + %Desa dibagi 11	%	n/a	n/a	25,35	25,97 (%11 pelayanan PSKS/11* 100)	102,45 (25,97/25, 35*100)	Sangat Baik	25,64
3	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah	Indikator: Kategori RB Perangkat Daerah Meta Indikator: OPD telah melaksanakan RB dengan kriteria A, Predikat sangat baik, rentang nilai/angka >80-90.	indeks	n/a	n/a	A	A (berdasar kan nilai PKKI Aplikasi Sengguh)	A (berdasar kan nilai PKKI Aplikasi Sengguh)	Sangat Baik	A

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

3.1.1. Sasaran 1: Terpenuhinya kebutuhan dasar, perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan perilaku bagi PPKS

Kinerja sasaran terpenuhinya kebutuhan dasar, perlindungan dan jaminan sosial serta perubahat perilaku bagi PPKS dengan indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III. 3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Terpenuhinya kebutuhan dasar, perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan perilaku bagi PPKS	Persentase PPKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dan meningkat keberfungsian sosialnya	Meta Indikator: Rata-rata persentase penanganan pada 14 jenis PPKS target pelayanan Formulasi Perhitungan: % ABT + %AT + %ABH Anjal + %ADK + %PD + %Gepeng + %ODHA + %LUT + %PRSE + % AMPK + % FM + %KTK PMBS + % KBA + % KBS dibagi 14 sasaran penanganan PPKS

Kinerja sasaran diatas diukur dengan indikator persentase PPKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dan meningkat keberfungsian sosialnya yang merupakan rata-rata dari persentase penanganan pada 14 jenis PPKS target pelayanan, yaitu Anak Balita Terlantar, Anak Terlantar, Anak Berhadapan Hukum dan Anak Jalanan, Anak dengan Kedisabilitasan, Penyandang Disabilitas, Gelandangan dan Pengemis, Orang dengan HIV dan AIDS, Lanjut Usia Terlantar, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi, Anak Memerlukan Perlindungan Khusus, Fakir Miskin, Korban Tindak Kekerasan Pekerja Migran Bermasalah Sosial, Korban Bencana Alam, dan Korban Bencana Sosial dengan rincian:

Tabel III. 4 Capaian Hasil Penanganan 14 Sasaran PPKS

No	Jenis PPKS	Populasi 2022	Satuan	Target		Realisasi	
				Fisik	Persentase (%) (=5/3*100%)	Fisik	Persentase (%) (=7/3*100%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Anak Balita Terlantar (ABT)	441	Anak	114	25,85	421	95,46
2	Anak Terlantar (AT)	7.902	Anak	300	3,80	1.679	21,25
3	Anak Berhadapan Hukum dan Anak Jalanan (ABH)	119	Anak	98	82,35	361	303,36
4	Anak dengan Kedisabilitasan (ADK)	1971	Orang	50	2,54	50	2,54
5	Penyandang Disabilitas (PD)	26.866	Orang	122	0,45	204	0,76
6	Gelandangan dan Pengemis (Gepeng)	234	Orang	178	76,07	310	132,48
7	Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA)	5.127	Orang	7	0,14	7	0,14
8	Lanjut Usia Terlantar (LUT)	33.129	Orang	2.803	8,46	3.093	9,34
9	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)	12.407	Orang	70	0,56	99	0,80
10	Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)	29	Anak	6	20,69	11	37,93
11	Fakir Miskin (FM)	474.490	Orang	1.600	0,34	2.091	0,44
12	Korban Tindak Kekerasan Pekerja Migran Bermasalah Sosial (KTK)	838	Orang	5	0,60	5	0,60
13	Korban Bencana Alam (KBA)	16.187	Orang	1.500	100	1.500	100
14	Korban Bencana Sosial (KBS)	314	Orang	235	100	1.500	100

Indikator Sasaran 1 : Persentase PPKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dan meningkat keberfungsian sosialnya **Meta Indikator Sasaran 1:** Rata-rata persentase penanganan pada 14 jenis PPKS target pelayanan	**Formulasi Perhitungan :** %ABT + %AT + %ABH + %ADK + %PD + %Gepeng + %ODHA + %LUT + %PRSE + %AMPK + %FM + %KTK + %KBA + %KBS di bagi 14 di kali 100 = 95,45%ABT + 21,25%AT + 303,36%ABH + 2,54%ADK + 0,76%PD + 132,48%Gepeng + 0,14%ODHA + 9,34%LUT + 0,80%PRSE +

No	Jenis PPKS	Populasi 2022	Satuan	Target		Realisasi	
				Fisik	Persentase (%) (=5/3*100%)	Fisik	Persentase (%) (=7/3*100%)
1	2	3	4	5	6	7	8
					37,93%AMPK + 0,44%FM + 0,60%KTK + 100%KBA + 100%KBS = **805,09** **= 805,09/14*100** **= 57,50%**		

Analisis Ketercapaian Sasaran 1: Terpenuhinya kebutuhan dasar, perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan perilaku bagi PPKS adalah sebagai berikut:

a. Tercapai 57,5% dari target 30,13%, dengan demikian persentase realisasi terhadap target sebesar 190,84% (terlampaui).
b. Capaian target indikator pada tahun 2023 terhadap target tahun 2026 sudah terlampaui 189,5%

Keberhasilan capaian Sasaran 1, dengan indikator persentase PPKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dan meningkat keberfungsian sosialnya tersebut didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel III. 5 Capaian Program, Kegiatan, dan SubKegiatan terhadap Sasaran 1

Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
1. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan		Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang memperoleh dukungan pemulangan	0.6%	0.6%	100
	1.1 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Tertanganinya warga negara migran Korban Tindak Kekerasan melalui dukungan pemulangan	5 orang	5 orang	100

Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
	1.1.1 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	5 orang	5 orang	100
2. Program Rehabilitasi Sosial		Persentase Anak Bermasalah Sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	21.41 %	50.34 %	235.12
	1.1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui lembaga kesejahteraan sosial	525 orang	525 orang	100
	1.1.1 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	495 orang	495 orang	100
	1.1.2 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	495 orang	495 orang	100
	1.1.3 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	475 orang	475 orang	100

Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
	1.1.4 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	16 orang	16 orang	100
	1.1.5 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	525 orang	525 orang	100
	1.1.6 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	525 orang	525 orang	100
	1.1.7 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	525 orang	525 orang	100
	1.1.8 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	16 orang	16 orang	100
	1.1.9 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	525 orang	525 orang	100
	1.1.10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	21 orang	21 orang	100

Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
	1.1.11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	6 orang	6 orang	100
	1.1.12 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	5 dokumen	5 dokumen	100
	1.2 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi anak terlantar dan anak bermasalah sosial lainnya melalui lembaga kesejahteraan sosial	468 orang	468 orang	100
	1.2.1 Pengasuhan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	125 anak	125 anak	100
	1.2.2 Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	428 orang	428 orang	100
	1.2.3 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	438 orang	438 orang	100
	1.2.4 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	138 orang	138 orang	100
	1.2.5 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	438 orang	438 orang	100

Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
	1.2.6 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Provinsi	433 orang	433 orang	100
	1.2.7 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	133 orang	133 orang	100
	1.2.8 Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	5 orang	5 orang	100
	1.2.9 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	438 orang	438 orang	100
	1.2.10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	23 orang	23 orang	100
	1.2.11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	37 orang	37 orang	100
	1.2.12 Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	5 orang	5 orang	100
	1.2.13 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	2 dokumen	2 dokumen	100

Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
	1.3 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi lanjut usia terlantar melalui Panti Sosial dan lembaga kesejahteraan sosial	3113 orang	3113 orang	100
	1.3.1 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	1838 orang	1838 orang	100
	1.3.2 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	338 orang	338 orang	100
	1.3.3 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	228 orang	228 orang	100
	1.3.5 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	303 orang	303 orang	100
	1.3.6 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	1353 orang	1353 orang	100
	1.3.7 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	228 orang	228 orang	100
	1.3.10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	72 orang	72 orang	100

Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
	1.3.11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	24 orang	24 orang	100
	1.3.12 Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	30 orang	30 orang	100
	1.4 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi gelandangan dan pengemis melalui Panti Sosial	40 orang	40 orang	100
	1.4.1 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	40 orang	40 orang	100
	1.4.2 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	40 orang	40 orang	100
	1.4.3 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	40 orang	40 orang	100
	1.4.4 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	40 orang	40 orang	100
	1.4.5 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	40 orang	40 orang	100

Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
	1.4.6 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	40 orang	40 orang	100
	1.4.7 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	40 orang	40 orang	100
	1.4.8 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Gelandangan bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi	5 orang	5 orang	100
	1.4.9 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	40 orang	40 orang	100
	1.4.10 Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	10 orang	10 orang	100
	1.4.11 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	4 dokumen	4 dokumen	100

Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
	1.5 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial.	277 orang	277 orang	100
	1.5.1 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	277 orang	277 orang	100
	1.5.2 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	277 orang	277 orang	100
	1.5.3 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	277 orang	277 orang	100
	1.5.4 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	277 orang	277 orang	100
	1.5.5 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	277 orang	277 orang	100
	1.5.6 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	277 orang	277 orang	100

Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
	1.5.7 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	150 orang	150 orang	100
	1.5.8 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi	70 orang	70 orang	100
	1.5.9 Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	150 orang	150 orang	100
	1.5.10 Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	157 orang	157 orang	100
	1.5.11 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	14 dokumen	14 dokumen	100

Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		Persentase anak balita terlantar dan fakir miskin yang memperoleh perlindungan sosial dan atau jaminan sosial	3.57%	13.03%	364.98
	1.1. Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Terlindunginya anak balita terlantar dan anak terlantar dengan memperoleh calon orang tua angkat.	31 orang	31 orang	100
	1.1.1 Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	20 orang	20 orang	100
	1.1.2 Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	1 orang	1 orang	100
	1.2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Terlindunginya Fakir Miskin dengan tersedianya data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi yang akurat dan fakir miskin memperoleh bimbingan keterampilan berusaha dan bantuan ekonomis produktif.	1.865 orang	1.865 orang	100
	1.2.1 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM)vyang Mendapatkan Bantuan SosialvKesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	1.841 keluarga	1.841 keluarga	100
	1.2.2 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	150 keluarga	150 keluarga	100

Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
4. Program Penanganan Bencana		Persentase Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial yang memperoleh dukungan psikososial dan pemenuhan kebutuhan dasar	100%	100%	100
	1.1 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Terlaksananya kesiapsiagaan bencana dan terlindunginya korban bencana alam dan korban bencana sosial melalui dukungan psikososial dan pemenuhan kebutuhan dasar	1.735 orang	1.735 orang	100
	1.1.1 Penyediaan Permakanan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	250 orang	250 orang	100
	1.1.2 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	50 orang	50 orang	100
	1.1.3 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	1 unit	1 unit	100
	1.1.4 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	250 orang	250 orang	100
	1.1.5 Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	1.000 orang	1.000 orang	100

Capaian tersebut didukung dari:

a. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Program Penanganan Bencana

Penjelasan disertai dokumentasi :

b. Capaian tersebut merupakan hasil penangangan 14 PPKS yang ada di Dinas Sosial DIY dan 6 UPT, yang terdiri dari Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Penyandang Disabilitas (BRTPD), Balai Perlindungan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW), Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras (BRSBKL), Balai Perlindungan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR), Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak (BRSPA), dan Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha (BPSTW).

Gambar Sasaran 1

Anak Terlantar

Anak Terlantar

Anak Berhadapan Hukum dan Anak Jalanan

Anak Berhadapan Hukum dan Anak Jalanan

Anak dengan Kedisabilitasan

Anak dengan Kedisabilitasan

Penyandang Disabilitas

Penyandang Disabilitas

Gelandangan dan Pengemis

Gelandangan dan Pengemis

Orang dengan HIV dan AIDS

Orang dengan HIV dan AIDS

Lanjut Usia Terlantar

Lanjut Usia Terlantar

Perempuan Rawan Sosial Ekonomi

Perempuan Rawan Sosial Ekonomi

Fakir Miskin

Fakir Miskin

Korban Tindak Kekerasan Pekerja Migran Bermasalah Sosial

Korban Tindak Kekerasan Pekerja Migran Bermasalah Sosial

Korban Bencana Alam

Korban Bencana Alam

Korban Bencana Sosial

Korban Bencana Sosial

Faktor Pendukung keberhasilan

Faktor *internal* dan faktor *eksternal* berpengaruh pada keberhasilan ketercapaian indikator kinerja sasaran. Koordinasi *internal* yang rutin melalui apel pagi selalu di laksanakan. Selain itu, adanya pengembangan pelayanan terhadap remaja bermasalah sosial yang merespon isu kenakalan remaja juga membantu ketercapaian indikator kinerja sasaran yang melebihi target. Merespon isu kenakalan remaja ini dilakukan dengan sosialisasi kepada sekolah menangah atas yang ada di DIY.

Faktor Penghambat keberhasilan

Kondisi sosial seperti bencana alam atau bencana sosial merupakan hal yang tidak bisa di prediksi, sehingga pelayanan kita yang tersedia bersifat *buffer stock* atau berjaga – jaga.

3.1.2. Sasaran 2: Terwujudnya peningkatan kemampuan partsipasi dan peran PSKS

Tolak ukur tercapainya sasaran terwujudnya peningkatan kemampuan partsipasi dan peran PSKS sebagaimana indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III. 6 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Terwujudnya peningkatan kemampuan partsipasi dan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase PSKS dan masyarakat sasaran yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial	Meta Indikator: Rata-rata persentase pelayanan pada 11 jenis target sasaran PSKS Formulasi Perhitungan: % Kesetiakawanan + % Nilai Pahlawan + % Keluarga Pahlawan + % PSM + % TKSK + % LKS + %WKSBM + % KT + % Tagana + % DU + % Desa dibagi 11 sasaran PSKS

Kinerja sasaran diatas diukur dengan indikator persentase PSKS dan masyarakat sasaran yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial yang merupakan rata-rata dari persentase penanganan pada 11 jenis PPKS target pelayanan, kinerja 11 PSKS, yaitu Kesetiakawanan, Nilai Pahlawan, Keluarga Pahlawan, Pekerja Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat, Karang Taruna, Taruna Siaga Bencana, Dunia Usaha, dan Penyuluhan Desa dengan rincian:

Tabel III. 7 Capaian Hasil Penanganan 11 Sasaran PSKS

No	Jenis PSKS	Populasi 2022	Satuan	Target		Realisasi	
				Fisik	Persentase (%) (=5/3*100%)	Fisik	Persentase (%) (=7/3*100%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kesetiakawanan	113.612	Orang	4.000	3,52	3.500	3,08
2	Keluarga Pahlawan	9	Orang	9	100	9	100
3	Nilai Pahlawan	2.243.400	Orang	2.500	0,11	11.372	0,51
4	Pekerja Sosial Masyarakat	5.057	Orang	41	0,81	41	0,81
5	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	78	Orang	78	100	78	100

No	Jenis PSKS	Populasi 2022	Satuan	Target		Realisasi	
				Fisik	Persentase (%) (=5/3*100%)	Fisik	Persentase (%) (=7/3*100%)
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Lembaga Kesejahteraan Sosial	316	Lembaga	30	9,49	30	9,49
7	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat	229	Orang	15	6,55	15	6,55
8	Karang Taruna	438	Orang	17	3,88	43	9,82
9	Taruna Siaga Bencana	1.091	Orang	312	28,60	312	28,60
10	Dunia Usaha	238	Lembaga	40	16,81	40	16,81
11	Penyuluhan Desa	438	Orang	40	9,13	44	10,05

Indikator Sasaran 2 : Persentase PSKS dan masyarakat sasaran yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial **Meta Indikator Sasaran 2:** Rata-rata persentase penanganan pada 11 jenis PSKS target pelayanan	**Formulasi Perhitungan :** %Kesetiakawanan + %Keluarga Pahlawan + %Nilai Pahlawan + %PSM + %TKSK + %LKS + %WKSBM + %KT + %Tagana + %DU + %Desa dibagi 11 sasaran PSKS dikali 100 = 3,08% Kesetiakawanan + 100% Keluarga Pahlawan + 0,51% Nilai Pahlawan + 0,81% PSM + 100% TKSK + 9,49% LKS + 6,55% WKSBM + 9,82% KT + 28,60% Tagana +16,81% DU + 10,05% Desa **= 285,71** **= 285,71/11*100** **= 25,97**

Analisis Ketercapaian Sasaran 2: Terwujudnya peningkatan kemampuan partsipasi dan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah sebagai berikut:

a. Tercapai 25,97% dari target 25,35% dengan demikian persentase realisasi terhadap target sebesar 102,45% (terlampaui).
b. Capaian target indikator pada tahun 2023 terhadap target tahun 2026 sudah tercapai sebesar 102,45%

Keberhasilan capaian Sasaran 2, dengan Persentase PSKS dan masyarakat sasaran yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial tersebut didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel III. 8 Capaian Program, Kegiatan, dan SubKegiatan terhadap Sasaran 2

Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
1. Program Pemberdayaan Sosial		Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) baik perorangan, kelompok, maupun kelembagaan yang memperoleh komunikasi, informasi edukasi dan sosialisasi dalam melakukan pelayanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan penerbitan rekomendasi izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang/ barang	21,91 %	22,04 %	100,59 %
	1.1 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Terpenuhinya dukungan penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada PSKS perorangan, kelompok, maupun kelembagaan yang memperoleh komunikasi, informasi edukasi dan sosialisasi dalam melakukan pelayanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1.676 orang	1.676 orang	100 %

Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
	1.1.1 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyaakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	1.598 orang	1.598 orang	100 %
	1.1.2 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya	78 orang	78 orang	100 %
	1.1.3 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	16 lembaga	16 lembaga	100 %
2. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		Persentase penguatan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, kejuangan, kesetiakawanan sosial dalam masyarakat	34,54 %	34,84 %	100,86 %
	1.1 Pengelolaan Taman Makan Pahlawan Nasional Provinsi	Terlaksananya penguatan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial dalam masyarakat serta pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional	3009 orang	3009 orang	100 %

Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
	1.1.1 Pemeliharaan Taman Makam Pahwalan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	23 makam	23 makam	100 %

Capaian tersebut didukung dari:

a. Program Pemberdayaan Sosial dan Program Pengelolaan Taman Makan Pahlawan

Penjelasan disertai dokumentasi

b. Capaian tersebut didukung dengan kinerja 11 PSKS, yaitu Kesetiakawanan, Nilai Pahlawan, Keluarga Pahlawan, Pekerja Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat, Karang Taruna, Taruna Siaga Bencana, Dunia Usaha, dan Penyuluhan Desa.

Gambar Sasaran 2

Kesetiakawanan

Kesetiakawanan

Nilai Pahlawan

Nilai Pahlawan

Ziarah Makam Pahlawan

Ziarah Makam Pahlawan

Lembaga Kesejahteraan Sosial

Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat

Taruna Siaga Bencana

Taruna Siaga Bencana

Dunia Usaha

Dunia Usaha

Faktor Pendukung keberhasilan

Keberhasilan ketercapaian indikator kinerja sasaran dicapai dengan adanya kerja sama lintas sektor yang dilakukan oleh Dinas Sosial DIY. Sebagai contoh, dalam pelaksanaan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN 2023) Dinas Sosial DIY bekerja sama dengan Polda DIY, Pramuka Kwarda DIY, TKSK DIY dan masih banyak lainnya dalam menyukseskan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional Tahun 2023. Dalam acara Kenduri Budaya Tahun 2023, Dinas Sosial DIY melibatkan Dukuh Plumbon dan warga setempat untuk hadir bersama sehingga dapat menciptakan kerukunan antar warga sehingga akan terbentuk persatuan dan kesetiakwanan.

Faktor Penghambat keberhasilan

Koordinasi dengan narasumber terkait jadwal kegiatan memerlukan perhatian lebih lanjut, karena kesibukan dari pihak narasumber. Selanjutnya, jumlah peserta ziarah rombongan yang akan hadir tidak dapat di prediksi, sehingga berpengaruh pada capaian target.

3.1.3. Sasaran 3: Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah

Tolak ukur tercapainya sasaran meningkatnya tatakelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah sebagaimana indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III. 9 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori RB Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Kinerja sasaran meningkatnya kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik pada tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III. 10 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	Indikator Sasaran	Capaian 2022	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap target 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kategori RB Perangkat Daerah Meta Indikator : merupakan nilai	A	A	A (merupakan nilai RB dari Pemda DIY)	93,13% (merupakan nilai RB dari Pemda DIY)	A	100% (merupakan nilai RB dari Pemda DIY)

	RB dari Pemda DIY						

Analisis Ketercapaian Sasaran 3: Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah

a. Tercapai 93,13%, dengan predikat A, dengan demikian persentase realisasi terhadap target sebesar 100%.
b. Dibandingkan realisasi tahun lalu yaitu 83,85%, terdapat kenaikan sebesar 9,28%. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa Dinas Sosial DIY dapat meningkatkan capaiannya.
c. Capaian target indikator pada tahun 2023 terhadap target tahun 2026 adalah sebesar 100%

Keberhasilan capaian Sasaran 3, dengan Indikator Kategori RB Perangkat Daerah tersebut didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel III. 11 Capaian Program, Kegiatan, dan SubKegiatan terhadap Sasaran 3

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
1. PROGRAM PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH PROVINSI		Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,88 Nilai	89,88 Nilai	100
	1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	100
	1.1.1 Penyusunan Dokumen Perancanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100
	1.1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	100

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
	1.1.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	100
	1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	100
	1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	247 Orang/ Bulan	247 Orang/ Bulan	100
	1.2.3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	60 Dokumen	100
	1.2.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100
	1.2.7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	umlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
	1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	100
	1.3.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	100
	1.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	48 Laporan	48 Laporan	
	1.5.5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	100
	1.6 Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	1.6.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	100
	1.6.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	100
	1.6.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	17 Paket	100

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
	1.6.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	13 Paket	13 Paket	100
	1.6.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100
	1.6.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	30 Dokumen	30 Dokumen	100
	1.6.9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Laporan	72 Laporan	100
	1.6.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	1.7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	12 bulan	100
	1.7.5 Pengadaaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100
	1.7.6 Pengadaan Pealatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	84 Unit	84 Unit	100

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
	1.7.9 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	100
	1.7.10 Pemgadaan SArana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	38 Unit	38 Unit	100
	1.8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	100
	1.8.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27 Laporan	27 Laporan	100
	1.8.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	108 Laporan	108 Laporan	100
	1.8.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	75 Laporan	75 Laporan	100
	1.9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	100

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
	1.9.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	91 Unit	91 Unit	100
	1.9.5 Pemeliharaan Mebel		33 unit	33 unit	
	1.9.6 Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	241 Unit	241 Unit	100
	1.9.9 Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	100
	1.9.10 Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya.	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	300 Unit	300 Unit	100
	Total Nilai yang mendukung Sasaran 1				

Capaian indikator kinerja reformasi birokrasi perangkat daerah didukung oleh Program Penunjang Pemerintah Daerah Provinsi. Dimana didalamnya terdapat kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, serta Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Faktor Pendukung keberhasilan

Adanya Apel Internal dari hari Senin hingga Kamis memperkuat koordinasi internal Dinas Sosial DIY. Sehingga dapat mempermudah internalisasi pemahaman terkait penyelenggaraan Reformasi Birokrasi.

Faktor Penghambat keberhasilan

Koordinasi dengan *stakeholder* perlu di tingkatkan lagi demi mendapatkan pemahaman dan komitmen yang sama.

3.2. Capaian Kinerja Lainnya

a. Capaian Kinerja SPM Urusan Sosial

Dinas Sosial DIY mengampu SPM Urusan Sosial. SPM Bidang Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. SPM Bidang Sosial Provinsi mencakup 5 (lima) pelayanan dasar yaitu :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti;
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti;
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti;
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti;
5. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi

Adapun realisasi SPM Bidang Sosial dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III. 12 Realisasi SPM Bidang Sosial Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Penerima Layanan	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	555	100 %	Setiap Tahun
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Jumlah Warga Negara anak telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	753	100 %	Setiap Tahun

3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti	2.028	100 %	Setiap Tahun
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti	309	100 %	Setiap Tahun
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.	Jumlah Warga Negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.	21.348	100 %	Setiap Tahun

a. Capaian SDG's

Dinas Sosial DIY tidak secara langsung berkontribusi pada capain SDG's, melainkan menyumbang data pada indikator SDG's yaitu indikator menghapus kemiskinan. Terdapat dua program Dinas Sosial DIY yang berkontribusi pada capaian tersebut, yaitu Program Rehabilitasi Sosial dan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial. Dari dua program tersebut, terdapat target sebesar 12,49% dan tercapai sebesar 31,68%. (Target program dilihat pada tabel III.5)

b. Capaian Kinerja Dinas Sosial DIY terhadap Capaian Sasaran Pemda DIY dan Program Pemda DIY

Sebagaimana amanat *cascading*, kinerja Dinas Sosial DIY memiliki kontribusi pada pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah dan Program Pemerintah Daerah sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel III. 13 Kontribusi Sasaran Dinas Sosial DIY terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Daerah

No	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemerintah Daerah	Target	Realisasi	% Realisasi	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Target	Realisasi	% Realisasi
1.	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat	1. Indeks Pembangunan Manusia	80,07	81,09	100,02	Terpenuhinya kebutuhan dasar, perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan perilaku bagi PPKS	Persentase PPKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dan meningkat keberfungsian sosialnya	30,13	57,5	190,84
		2. Tingkat Kemiskinan	10,74	11,04	97,21					

No	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemerintah Daerah	Target	Realisasi	% Realisasi	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Target	Realisasi	% Realisasi
						Terwujudnya peningkatan kemampuan partsipasi dan peran PSKS	Persentase PSKS dan masyarakat sasaran yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial	25,35	25,97	102,45
2.	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	1. Opini BPK	WTP	WTP	100	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A	A	A

Penjelasan :

1. Meningkatnya Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat salah satunya dipengaruhi oleh terpenuhinya kebutuhan dasar, perlindungan dan jaminan sosial, serta perubahan perilaku bagi PPKS dan terwujudnya peningkatan kemampuan partsipasi dan peran PSKS.
2. Indikator persentase PPKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dan meningkat keberfungsian sosialnya, dan indikator persentase PSKS dan masyarakat sasaran yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial dari Dinas Sosial DIY berkontribusi pada capaian indikator Pemerintah Daerah indeks pembangunan daerah dan tingkat kemiskinan
3. Adanya tata kelola pemerintahan yang baik di Dinas Sosial DIY mendukung ketercapaian sasaran meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan.

Tabel III. 14 Kontribusi Program Dinas Sosial DIY terhadap Capaian Program Pemerintah Daerah

No	Program Pemerintah Daerah	Indikator Program Pemerintah Daerah	Target	Realisasi	% Realisasi	Program Perangkat Daerah	Indikator Program PD	Target	Realisasi	% Realisasi
1	Program Penanggulangan Kemiskinan	Penurunan Jumlah Penduduk Miskin (dalam Ribu Orang)	429.05	448.47	95.47	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) baik perorangan, kelompok, maupun kelembagaan yang memperoleh komunikasi, informasi edukasi dan sosialisasi dalam melakukan pelayanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan penerbitan rekomendasi izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang/ barang	21,91	22,04	100,59
						Program Penanganan Warga Negara Migran Korban	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang memperoleh	1,19	1,19	100

No	Program Pemerintah Daerah	Indikator Program Pemerintah Daerah	Target	Realisasi	% Realisasi	Program Perangkat Daerah	Indikator Program PD	Target	Realisasi	% Realisasi
						Tindak Kekerasan	dukungan pemulangan			
						Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Anak Bermasalah Sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	21,41	50,34	235,12
						Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase anak balita terlantar dan fakir miskin yang memperoleh perlindungan sosial dan atau jaminan sosial	3,57	13,03	364,99
						Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial yang memperoleh dukungan psikososial dan pemenuhan kebutuhan dasar	100	100	100
						Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase penguatan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, kejuangan, kesetiakawanan sosial dalam masyarakat	34,54	34,83	100,84
						Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase penyelenggaraan kesejahteraaan sosial melalui pelestarian nilai-nilai budaya	100	100	100
2	Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	Tinggi	Tinggi	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,03%	87,65 %	97,36

No	Program Pemerintah Daerah	Indikator Program Pemerintah Daerah	Target	Realisasi	% Realisasi	Program Perangkat Daerah	Indikator Program PD	Target	Realisasi	% Realisasi
		Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	87,43	86,67	99,13					

Penjelasan :

1. Program Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Daerah di ukur dengan indikator penurunan jumlah penduduk miskin (dalam Ribu Orang). Program ini di dukung oleh Program Perangkat Daerah yaitu Program Pemberdayaan Sosial, Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Penanganan Bencana, dan Program Pengelolaan Taman Makan Pahlawan.
2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi yang mendukung ketercapaian Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah mendorong Dinas Sosial DIY agar berupaya memberikan pelayanan dengan lebih baik dari waktu ke waktu. Manajemen kinerja yang lebih baik dan lebih komprehensif telah membawa Dinas Sosial DIY pada pencapaian kategori Pelayanan Prima sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

3.1. Efisiensi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel III. 15 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (Rp)
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terpenuhinya kebutuhan dasar, perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan perilaku bagi PPKS	Persentase PPKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dan	30,13	57,50	190,84	28.106.735.820	27.304.533.335	97,14	

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (Rp)
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		meningkat keberfungsian sosialnya							
2	Terwujudnya peningkatan kemampuan partsipasi dan peran PSKS	Persentase PSKS dan masyarakat sasaran yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial	25,35	25,97	102,45	4.913.328.300	4.827.095.033	98,24	
	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A	A	100%	54.280.547.865	53.222.226.470	98,05	
Jumlah						91.580.305.849	89.318.655.612	97,53	
Total Belanja Operasional						85.521.981.665	83.637.732.650	97,80	

Sumber: *http://sengguh.jogjaprov.go.id/*, *Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial DIY Th 2023, Laporan Keuangan Dinas Sosial DIY Th 2023*

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja sasaran Dinas Sosial DIY melampaui target kinerja tahun 2023 dengan realisasi anggaran capaian dari total belanja operasional program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp 85.521.981.665, terealisasi Rp 83.637.732.650 atau 97,80% sehingga dapat dikatakan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja telah efisien.

terdapat efisiensi Rp 1.884.249.015 atau 2,20% yang bersumber dari:

- Sisa pengadaan barang dan jasa
- Efisiensi belanja perjalanan dinas
- Efisiensi honor narasumber
- Efisiensi uang saku peserta kegiatan
- Efisiensi tagihan air, listrik, telepon dan kegiatan belanja lain yang menyesuaikan harga pasar
- Efisiensi belanja mobilitas darat, akomodasi dan transportasi menyesuaikan kondisi dan kebutuhan di lapangan
- Efisiensi belanja sewa (tempat, meja, kursi, genset, tenda, *sound system*) menyesuaikan kondisi di lapangan

3.2. Inovasi

Tantangan Global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah DIY untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima, setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemda DIY diwajibkan untuk melakukan inovasi. Komitmen inovasi tersebut tertuang dalam Surat Edaran SE Gubernur DIY No. 065/12017 Tahun 2015 tentang Inovasi Pelayanan Publik yang mendorong *"One Agency, One Innovation"*. Inovasi yang diemban oleh Perangkat Daerah ditujukan juga untuk mencapai keberhasilan capaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan, Dinas Sosial DIY telah menginisiasi inovasi, sebagai berikut :

1. Open the Gate

Penyandang Disabilitas Mental Terlantar yang tinggal dan memperoleh pelayanan di dalam panti/balai masih mengalami keterbatasan sosialisasi, interaksi, dan beraktivitas di luar lingkungan panti/balai. Mereka harus menjalani kehidupan sehari-hari di dalam kompleks panti/balai, yang berpotensi membuat mereka semakin depresi berkepanjangan. Berbeda halnya dengan panti/balai yang menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas lainnya yang bersifat lebih terbuka. Salah satu penyebabnya, penyandang disabilitas mental

masih mendapatkan stigma dan diskriminasi yang cukup kuat dari masyarakat, bahkan oleh penyelenggara pelayanan yang masih beranggapan bahwa mereka berisiko untuk melarikan diri, mengalami kambuh, atau menyebabkan kegaduhan di masyarakat, dan lain sebagainya. Stigma dan diskriminasi yang selama ini masih ditemukan khususnya dalam pelayanan di panti/balai ini dapat berdampak buruk terhadap upaya rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas mental yang pada akhirnya bertujuan untuk mengembalikan mereka dalam kehidupan di masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan kemandirian dan keberfungsian sosial bagi penyandang disabilitas mental melalui rehabilitasi sosial di dalam panti/balai, maka diperlukan adanya suatu terobosan untuk menjadikan panti/balai menjadi lebih terbuka bagi penyandang disabilitas mental penerima layanan maupun masyarakat. Keterbukaan panti/balai juga merupakan upaya penghapusan stigma bagi penyandang disabilitas mental.

Open The Gate dihadirkan oleh Dinas Sosial DIY melalui Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras (BRSBKL) bersama Pusat Rehabilitasi YAKKUM. *Open The Gate* hadir untuk menginisiasi perubahan pengelolaan panti sosial bagi penyandang disabilitas mental yang selama ini memiliki kecenderungan tertutup, menjadi terbuka dengan meningkatkan sosialisasi dan interaksi penyandang disabilitas dengan lingkungan serta menambah peran masyarakat dalam upaya rehabilitasi sosial agar dapat lebih menerima penyandang disabilitas mental dalam panti/balai untuk bersosialisasi.

Open The Gate merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi:

1. *Assessment* Penyandang Disabilitas Mental di BRSBKL,
3. Penyelenggaraan Pendidikan Kritis dan peningkatan kapasitas bagi staff BRSBKL,
4. Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Kalurahan sekitar,
5. Pengorganisasian penyandang disabilitas mental dan keluarganya dengan pendampingan, pertemuan rutin kelompok swabantu, *family support group*, pelatihan kesehatan jiwa dan edukasi sistem rujukan penyandang disabilitas mental,
6. Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Mental di BRSBKL yang meliputi pelatihan kegiatan produktif, *on the job training* dan fasilitasi *start up kit*.

Gambar Inovasi 1

Open the Gate di Balai Rehabilitasi Sosial Bikan Karya dan Laras

2. Pandu Persada

Anak adalah generasi penerus bangsa yang pada saatnya nanti akan memimpin dan mempertahankan kehidupan dan peradaban negeri kita. Oleh karena itu sebagai orang tua sudah seharusnya menyiapkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur. Setiap anak berhak untuk mendapatkan hak-haknya. Hak dasar anak dalam konvensi hak anak antara lain hak untuk hidup, hak perlindungan, hak tumbuh dan berkembang serta hak untuk berpartisipasi. Dalam prakteknya tidak semua anak mendapatkan hak-haknya, tidak sedikit anakanak yang bermasalah yang mendapatkan berbagai tindak kekerasan dan ekploitasi dari orang tuanya. Orang tua yang seharusnya melindungi dan memberikan rasa aman justeru menjadi penyebab hilangnya hak-hak anak. Kondisi tersebut sangat ironis dengan semangat perjuangan bangsa ini untuk mengantar anak-anak Indonesia menjadi generasi penerus bangsa yang beriman, cerdas, tangguh dan memiliki daya saing yang tinggi untuk memimpin negeri ini menjadi negeri yang aman, tentram, damai dan sejahtera.

Permasalahan yang dialami anak, juga bisa disebabkan ketidakmampuan orang tuanya untuk memenuhi hak-hak anak. Ketidakmampuan orang tua tersebut juga disebabkan beberapa hal antara lain, kemiskinan, mengalami gangguan kejiwaan, kedisabilitasan, kebodohan, *broken home*, tidak bertanggung jawab dan

menelantarkan anak, membuang anak, terjerat masalah hukum, pasangan tanpa nikah yang sah dan berbagai persoalan keluarga lainnya. Dalam mengupayakan kesejahteraan sosial anak, Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak (BRSPA) mengalami kendala, yaitu ketika anak sudah dalam kondisi yang baik dan siap dikembalikan dalam pengasuhan keluarga, namun keluarga yang belum memiliki kesiapan untuk mengasuh anaknya. Hal ini terjadi karena permasalahan anak dan permasalahan keluarga adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, tetapi selama ini yang ditangani hanya permasalahan yang dialami anak sedangkan sumber masalah utamanya yaitu permasalahan dari orang tua atau keluarganya belum mendapatkan penanganan yang optimal. Dinas Sosial DIY melalui Balai Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak membuat gagasan inovasi Pandu Persada (Penanganan Terpadu Permasalahan Anak dan Keluarga). Dimana dalam Pandu Persada berusaha untuk menggandeng berbagai pihak yang terkait dan tergabung dalam tim kerja untuk menangani masalah anak dan masalah keluarga secara terpadu dan holistik, sehingga dengan Pandu Persada tersebut diharapkan permasalahan anak tertangani, permasalahan orang tuanya juga tertangani sehingga anak terselesaikan masalahnya, orang tua berdaya dan dapat mengasuh kembali putra-putrinya.

Gambar Inovasi 2

Pandu Persada di Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak

3.3. Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat maka Dinas Sosial DIY sebagaimana *cascading* kinerja pada gambar 1.1 dan mandat kinerja sebagaimana tergambar pada gambar 1.2 melaksanakan optimalisasi lintas sektor. Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor tersebut dilaksanakan berlandaskan Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 9/INSTR/2021 tentang Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Optimalisasi kinerja Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor merupakan salah satu faktor pendukung Dinas Sosial DIY dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan di tengah kondisi *Refocusing* dan realokasi anggaran untuk pemulihan ekonomi dan kesehatan

Tabel III. 16 Inventarisasi Lintas Sektor Dinas Sosial DIY

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	Kelompok SASARAN	
1.	Koordinasi Penanganan PPKS	Dinas Kesehatan DIY	Dinas Sosial DIY bersama Dinas Kesahatan DIY bekerja sama penangan stunting di DIY.	Terjalinnya hubungan yang baik dengan lintas sektor	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Bagi OPD: Mendukung pencapaian kinerja Sasaran Persentase PMKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dapat hidup mandiri dan berfungsi sosial Bagi kelompok sasaran : Memberikan panduan dan arahan dalam penanganan PPKS
		POLDA DIY	Dinas Sosial DIY bekerja sama dengan Polda DIY sebagai kegiatan penegakan perijinan UGB, instruktur bimbingan sosial di *Camp Assesment* dan Rumah Perlindungan Sosial (RPS)			
		BPS DIY	Dinas Sosial DIY bekerja sama dengan BPS DIY dalam hal pelaksanaan Minanggul Raharja.			
		Paksikaton (Paguyuban Seksi Keamanan Kraton)	Dinas Sosial DIY bekerja sama dengan Paksikaton (Paguyuban Seksi Keamanan Kraton) memberikan edukasi pada gelandangan dan pengemis di titik-titik rawan gepeng			

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	Kelompok SASARAN	
		Satpol PP DIY	Dinas Sosial DIY bekerja sama dengan Satpol PP DIY dalam penertiban dan penanganan gelandangan dan pengemis			
		Baznaz DIY Baznaz Sleman	Dinas Sosial DIY bekerja sama dengan Baznas DIY dan Baznas Sleman untuk pemberdayaan PPKS Dinas Sosial DIY sebagai pemberian modal usaha dalam rangka pemberdayaan bagi PPKS			
		Dinas Sosial Kabupaten/Kota	Dinas Sosial Kabupaten Kota sebagai mitra Dinas Sosial DIY memberikan verifikasi dan validasi data penerima bantuan atau penerima layanan			
2.	Peningkatan kemampuan partsipasi dan peran PSKS	PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil)	Dinas Sosial DIY bekerja sama dengan PINBUK dalam pendampingan usaha untuk Pemasaran Online dan Pengelolaan Usaha	Terselenggaranya Bimtek Peningkatan Kapasitas	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Bagi OPD: Mendukung pencapaian kinerja Sasaran Persentase PMKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dapat hidup mandiri dan berfungsi sosial
		Kapanewon Kalurahan	Dinas Sosial DIY bekerja sama dengan Kapanewon dan Kalurahan untuk membantu			

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	Kelompok SASARAN	
			menghadirkan peserta dalam kegiatan sebagai upaya / fasilitator untuk penyampaian program/kegiatan Dinas Sosial DIY kepada masyarakat sebagai wujud partisipasi bersama dalam penanganan permasalahan sosial di DIY			Bagi kelompok sasaran : Meningkatkat kapasitas PSKS dalam melakukan penanganan terhadap PPKS
		PSKS yang terdiri : 1. Pekerja Sosial Profesional, Fungsional, dan Masyarakat 2. Taruna Siaga Bencana 3. LKS 4. Karang Taruna 5. LK3 6. Keluarga Pionir 7. WKSBM 8. Penyuluh Sosial Masyarakat 9. Penyuluh Sosial Fungsional 10. TKSK 11. Dunia Usaha	Bekerja sama dalam melakukan penanganan PPKS			

BAB IV Penutup

Bab IV berisi :
1. *Kesimpulan*
2. *Langkah Perbaikan Kinerja*

3.1. Kesimpulan

Hasil laporan kinerja Dinas Sosial DIY tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dinas Sosial DIY Tahun 2023 memiliki 3 sasaran kinerja utama sebagai tolak ukur kinerja. Sasaran pertama yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar, perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan perilaku bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) tercapai dengan persentase 190,84%. Sasaran kedua yaitu terwujudnya peningkatan kemampuan partsipasi dan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) tercapai dengan persentase 102,45%. Terakhir sasaran ketiga yaitu meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah tercapai dengan kriteria A predikat sangat baik.
2. Ketiga indikator utama berhasil tercapai, bahkan melebihi 100%. Keberhasilan ketercapaian tiga indikator kinerja sasaran tidak lepas dari adanya kerja sama yang baik antara di internal Dinas Sosial DIY sendiri. Serta terjalinnya hubungan baik dengan stakeholder yang terlibat dalam upaya penyelenggaraan kegiatan. Kemampuan SDM yang dimiliki juga turut menjadi faktor pendukung keberhasilan, baik petugas dari Dinas Sosial DIY ataupun pihak lain yang mendukung ketercapaian kegiatan.

3.2. Langkah Perbaikan Kinerja

Adapun langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Memaksimalkan potensi sumber daya manusia dan pelayanan dalam balai sehingga kebutuhan dasar, rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial PPKS dalam Balai dapat terpenuhi sesuai Permensos No 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Minimal Pelayanan Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota
2. Melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam pelayanan pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan pelestarian nilai-nilai budaya melalui Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan.
3. Memaksimalkan peran Tagana dan Difagana, instansi pemerintah, dan melibatkan masyarakat di daerah rawan bencana dalam hal penanganan bencana mulai dari pra, saat, dan pasca terjadinya bencana.

L A M P I R A N

Lampiran 1. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

Perangkat Daerah : Dinas Sosial

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal Kinerja Tujuan/Sasaran (Baseline 2021)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir Tahun (2026)
						Tahun ke-1 (2022)	Tahun ke-2 (2023)	Tahun ke-3 (2024)	Tahun ke-4 (2025)	Tahun ke-5 (2026)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Meningkatkan kualitas pelayanan rehabilitasi, perlindungan, pemberdayaan dan jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) guna meningkatkan fungsi sosial dalam mencapai kemandirian serta meningkatkan kapasitas dan partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase pelayanan rehabilitasi, perlindungan, pemberdayaan dan jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) guna meningkatkan fungsi sosial dalam mencapai kemandirian serta meningkatkan kapasitas dan partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial			n/a	n/a	28,03	28,2	28,24	28,27	28,27
			Terpenuhinya kebutuhan dasar, perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan perilaku bagi PPKS	Persentase PPKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dan meningkat keberfungsian sosialnya	N/A	N/A	30.13%	30.22%	30.28%	30.34%	30.34%
			Terwujudnya peningkatan kemampuan partsipasi dan peran PSKS	Persentase PSKS dan masyarakat sasaran yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial	N/A	N/A	25.35%	25.64%	25.64%	25.64%	25.64%
			Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	N/A	A	A	A	A	A

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS SOSIAL
ꦢꦶꦤꦱꦸꦱꦺꦴꦱꦶꦭ꧀
Jl Janti-Banguntapan Yogyakarta Telepon (0274) 514932 Facsimile (0274) 587060
Website: dissos.jogjaprov.go.id Email: dinsos@jogjaprov.go.id. Kode Pos 55198

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ENDANG PATMINTARSIH, SH, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HAMENGKU BUWONO X
Jabatan : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 2 Januari 2023

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
GUBERNUR	KEPALA DINAS SOSIAL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
HAMENGKU BUWONO X	ENDANG PATMINTARSIH, SH, M.Si
	NIP. 196604041993032007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perangkat Daerah : Dinas Sosial DIY
Jabatan : Kepala Dinas Sosial DIY

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terpenuhinya kebutuhan dasar, perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan perilaku bagi PPKS	Persentase PPKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dan meningkat keberfungsian sosialnya	%	30,13	Triwulan I	6,66
					Triwulan II	11,85
					Triwulan III	16,84
					Triwulan IV	30,13
2.	Terwujudnya peningkatan kemampuan partisipasi dan peran PSKS	Persentase PSKS dan masyarakat sasaran yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan	%	25,35	Triwulan I	2,10
					Triwulan II	13,19
					Triwulan III	15,82
					Triwulan IV	25,35

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
		sosial serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial				
3.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	A	Triwulan I	A
					Triwulan II	A
					Triwulan III	A
					Triwulan IV	A*)

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program RPD	Anggaran
1.	Program PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI (APBD)	Rp. 45.680.899.853,-
2.	Program PEMBERDAYAAN SOSIAL (APBD)	Rp. 4.307.468.300,-
3.	Program PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN (APBD)	Rp. 20.000.000,-
4.	Program REHABILITASI SOSIAL (APBD)	Rp. 7.129.508.800,-
5.	Program PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL (APBD)	Rp. 1.718.308.200,-
6.	Program PENANGANAN BENCANA (APBD)	Rp. 2.079.884.800,-
7.	Program PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN (APBD)	Rp. 606.660.000,-

No	Program RPD	Anggaran
8.	Program PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN (Dais)	Rp. 4.244.629.000,-
	Jumlah Anggaran	Rp. 61.542.729.953,-

Yogyakarta, 2 Januari 2023

PIHAK KEDUA
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS SOSIAL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ENDANG PATMINTARSIH, SH, M.Si
NIP. 196604041993032007

Perjanjian Kinerja Reviu Tahun 2023

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS SOSIAL
ꦢꦶꦤꦱꦺꦴꦱꦶꦮꦺꦴꦱꦶꦮꦭ
Jl Janti-Banguntapan Yogyakarta Telepon (0274) 514932 Facsimile (0274) 587060
Website: dissos.jogjaprov.go.id Email: dinsos@jogjaprov.go.id. Kode Pos 55198

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,sebagai tindak lanjut penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2023 perlu dilakukan penyesuaian Perjanjian Kinerja. Sehubungan dengan hal tersebut, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ENDANG PATMINTARSIH, SH, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HAMENGKU BUWONO X
Jabatan : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 8 November 2023

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
GUBERNUR	KEPALA DINAS SOSIAL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
HAMENGKU BUWONO X	ENDANG PATMINTARSIH, SH, M.Si
	NIP. 196604041993032007

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Perangkat Daerah : **Dinas Sosial DIY**
Jabatan : **Kepala Dinas Sosial DIY**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terpenuhinya kebutuhan dasar, perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan perilaku bagi PPKS	Persentase PPKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dan meningkat keberfungsian sosialnya	%	30,13	Triwulan I	6,66
					Triwulan II	11,85
					Triwulan III	16,84
					Triwulan IV	30,13
2.	Terwujudnya peningkatan kemampuan partisipasi dan peran PSKS	Persentase PSKS dan masyarakat sasaran yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial	%	25,35	Triwulan I	2,10
					Triwulan II	13,19
					Triwulan III	15,82
					Triwulan IV	25,35

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	A	Triwulan I	A
					Triwulan II	A
					Triwulan III	A
					Triwulan IV	A*)

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program RPD	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi (APBD)	Rp. 43.593.319.165,-
2.	Program Pemberdayaan Sosial (APBD)	Rp. 4.306.668.300,-
3.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan (APBD)	Rp. 20.000.000,-
4.	Program Rehabilitasi Sosial (APBD)	Rp. 7.089.405.800,-
5.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial (APBD)	Rp. 1.607.072.200,-
6.	Program Penanganan Bencana (APBD)	Rp. 2.079.884.800,-
7.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (APBD)	Rp. 606.660.000,-
8.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dais)	Rp. 4.181.193.864,-
9.	Program Penyelenggaran Keistimewaan Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan (Dais)	Rp. 98.500.000,-
	Jumlah Anggaran	Rp. 63.582.704.129,-

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV.

Yogyakarta, 8 November 2023

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
GUBERNUR	KEPALA DINAS SOSIAL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
HAMENGKU BUWONO X	ENDANG PATMINTARSIH, SH., M.Si
	NIP. 196604041993032007

Lampiran 3. Evaluasi LKj IP Tahun 2022

R

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

INSPEKTORAT

Jalan Cendana Nomor 40 Yogyakarta Telp: (0274) 562009 Fax: (0274) 512567
Website:http://inspektorat.jogjaprov.go.id e-mail: inspektorat@jogjaprov.go.id Kode Pos 55166

Yogyakarta, 14-3-2023

Nomor : 700/01055
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah pada Dinas Sosial DIY Tahun 2022

Kepada
Yth. Kepala Dinas Sosial DIY
di -
Yogyakarta

Dengan hormat kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah pada Dinas Sosial DIY Tahun 2022, sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Evaluasi

a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
d. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
e. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
f. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 401/KEP/2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2023;

g. Surat...

g. Surat Perintah Tugas Inspektur DIY Nomor 061/II/INSP/2023 tanggal 20 Februari 2023 tentang Evaluasi AKIP Perangkat Daerah pada Dinas Sosial DIY .

2. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, termasuk pada Perangkat Daerah merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan AKIP pada Perangkat Daerah maka diperlukan evaluasi. Dengan Evaluasi AKIP, diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan kualitas penerapan AKIP dalam rangka mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Dengan tercapainya capaian kinerja (hasil) Perangkat Daerah maka secara berjenjang pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah DIY.

3. Tujuan Evaluasi

a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
b. Menilai tingkat implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah;
d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP Perangkat Daerah;
e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi yaitu pada aspek perencanaan kinerja, aspek pengukuran kinerja, aspek pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

5. Metodologi Evaluasi

Dalam pelaksanaan Evaluasi AKIP ini, metodologi yang digunakan adalah wawancara, pengumpulan data, verifikasi dokumen, klarifikasi, dan selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka memperoleh kesimpulan terhadap tujuan evaluasi yang telah ditetapkan.

6. Gambaran...

6. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Sosial DIY mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial. Adapun fungsinya adalah sebagai berikut:

a. penyusunan program kerja Dinas;
b. perumusan kebijakan teknis bidang sosial;
c. penyelenggaraan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan fakir miskin, serta pemberdayaan masyarakat;
d. pemberian fasilitasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial Kabupaten/Kota;
e. pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
f. pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja bidang sosial;
g. penguatan, pengembangan dan pemanfaatan nilai-nilai, norma dan tradisi luhur dalam penanganan masalah sosial;
h. pengembangan program bidang sosial;
i. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
j. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
k. pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang sosial;
l. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan kabupaten/kota;
m. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Susunan organisasi Dinas Sosial DIY terdiri atas:

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri atas:
   1) Subbagian Umum;
   2) Subbagian Keuangan; dan
   3) Kelompok Substansi Program.
c. Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri atas:
   1) Kelompok Substansi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Rehabilitasi Sosial Anak; dan
   2) Kelompok Substansi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, Korban Tindak Kekerasan, dan Korban Perdagangan Orang.

d. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri atas:
   1) Kelompok Substansi Jaminan Sosial dan Perlindungan Lanjut Usia; dan
   2) Kelompok Substansi Penanganan Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial.
e. Bidang Penanganan Fakir Miskin terdiri atas:
   1) Kelompok Substansi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan, Perkotaan, dan Pesisir; dan
   2) Kelompok Substansi Penyuluhan Sosial.
f. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri atas:
   1) Kelompok Substansi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, Kelembagaan Masyarakat, dan Sumber Dana Sosial; dan
   2) Kelompok Substansi Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial.
g. Unit Pelaksana Teknis; dan
h. Jabatan Fungsional.

7. Gambaran Umum Implementasi AKIP Perangkat Daerah

Implementasi AKIP pada Dinas Sosial DIY dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Pada aspek perencanaan kinerja, Dinas Sosial DIY telah memiliki dokumen perencanaan kinerja jangka menengah dan jangka pendek, serta dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja;
b. Pada aspek pengukuran kinerja, telah terdapat definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja, memiliki mekanisme pengumpulan data kinerja, serta dilakukan secara berkala;
c. Pada aspek pelaporan kinerja, Dinas Sosial DIY telah menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), memformalkan, serta mempublikasikan dokumen pelaporan tersebut;
d. Pada aspek evaluasi akuntabilitas kinerja internal, telah dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang yang melibatkan seluruh unsur dalam organisasi. Dalam rangka peningkatan manajemen kinerja, Dinas Sosial DIY telah menggunakan Aplikasi Sengguh dalam rangka pengendalian dan evaluasi kinerja instansi. Dalam pengelolaan sumber daya manusia telah digunakan Aplikasi ASN Memayu sebagai sarana pengisian capaian kinerja pada tingkat individu. Inovasi lain dalam peningkatan kinerja yang digunakan oleh Dinas Sosial DIY yaitu Aplikasi SiPersis (Sistem Informasi Perlindungan, *Assessment* dan Rehabilitasi Sosial). Aplikasi SiPersis ini bertujuan untuk menguatkan tugas dan fungsi rehabilitasi sosial sesuai Permensos 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah

Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, serta penguatan integritas data agar dalam pelaporannya dapat maksimal mengikuti arahan Permendagri 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

8. Tindak Lanjut Evaluasi Tahun Sebelumnya

Terhadap rekomendasi atas evaluasi tahun sebelumnya, Dinas Sosial DIY telah menindaklanjuti dengan:

- Pada Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya, khususnya terkait capaian keluaran Pemeliharaan Air Limbah/Kotor/ Penugasan WC *Camp Assesment* terjadi kesalahan pengentrian dalam Aplikasi Sengguh. Seharusnya pada keluaran Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/Kotor/Pengurasan WC *Camp Assement* target 10 kali dan terealisasi 10 kali, namun tertentri di Aplikasi Sengguh target 10 kali realisasi 5 kali;
- Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi, khususnya terkait capaian keluaran Sosialisasi Perda Kesejahteraan Lanjut Usia dari target 5 lokasi terealisasi 2 lokasi, hal ini dikarenakan mengikuti SE Gubernur DIY Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penundaan Kegiatan Berpotensi Menimbulkan Kerumunan dan mengikuti Instruksi Gubernur DIY No. 17/INTSR/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19);*
- Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga, khususnya terkait capaian keluaran Pelayanan Reunifikasi ke Keluarga Klien RPS dari target 23 orang hanya terealisasi 12 orang, hal ini dikarenakan pelayanan reunifikasi ke keluarga Klien RPS tidak dapat diprediksi, menyesuaikan kondisi atau kebutuhan reunifikasi yang ada;
- Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga, khususnya terkait capaian keluaran Bantuan Sosial dan Layanan Dukungan Psikososial bagi Korban *Covid-19* di Shelter dari target 46 lokasi terealisasi 36 lokasi. Realisasi yang tidak sesuai dengan target ini dikarenakan kasus *Covid-19* di DIY sudah mulai menurun, sehingga tidak banyak penyintas yang ada di shelter, serta banyak yang melakukan isolasi mandiri dirumah masing-masing.
- Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan, khususnya terkait keluaran Fasilitasi Perawatan Jenazah Terlantar target 30 orang realisasi 13 orang, Fasilitasi Orang Terlantar kehabisan bekal untuk melanjutkan perjalanan target 286 orang realisasi 206 orang, dan Bantuan Air Bersih untuk Penanggulangan Kekeringan target 850

tangki realisasi 466 tangki merupakan kejadian yang tidak bisa di prediksi untuk pencapaiannya, dan sifatnya persediaan;

- Realisasi indikator kinerja sasaran Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dapat hidup mandiri dan berfungsi sosial tahun 2022 tercapai dengan persentase 106,75% dengan target 44,28% dan realisasi 47,27%. Dibandingkan realisasi tahun lalu, terdapat kenaikan sebesar 11,79%;
- Tahun 2022, Dinas Sosial DIY mendapatkan 3 penghargaan, yaitu:
  - Penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2022 atas inovasi Difagana (Difabel Siaga Bencana) sebagai Pionir Penanggulangan Bencana Berbasis Inklusi oleh Kementerian PAN RB;
  - Penghargaan Kategori OPD Informatif pada Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik DIY Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY pada tanggal 28 September 2022;
  - Penghargaan Ucapan Terima kasih oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat kepada Dinas Sosial DIY atas dukungan dan kontribusinya dalam penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur.

B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

1. Hasil Evaluasi AKIP

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Dinas Sosial DIY memperoleh nilai sebesar 84,66. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 27,16 atau 90,55% dari bobot sebesar 30%;
b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 26,80 atau 89,33% dari bobot sebesar 30%;
c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 12,56 atau 83,71% dari bobot sebesar 15%;
d. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 18,13 atau 72,53% dari bobot sebesar 25%.

2. Rekomendasi

Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Sosial DIY agar:

a. Menerapkan manajemen kinerja berkelanjutan meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi atas

kinerja internal sehingga praktik baik budaya kinerja yang telah dilakukan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan;

b. Meningkatkan koordinasi internal serta kolaborasi dengan perangkat daerah terkait dalam rangka pencapaian sasaran strategis Dinas Sosial DIY, yaitu: terpenuhinya kebutuhan dasar, perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan perilaku bagi PMKS dan terwujudnya peningkatan kemampuan, partisipasi dan peran potensi sumber kesejahteraan sosial;

c. Melakukan reviu internal lebih intensif dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Sosial DIY supaya menghasilkan laporan yang substansi dan redaksionalnya sesuai dengan pedoman penyusunan.

C. PENUTUPAN

1. Simpulan

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial DIY memperoleh nilai 84,66. Nilai tersebut masuk dalam kategori A dengan interpretasi Memuaskan.

2. Penguatan AKIP

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Sosial DIY diharapkan tidak hanya mendorong pencapaian *output* organisasi secara lebih efektif dan efisien namun juga mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada *outcome* yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah DIY. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama dan dukungan dari seluruh unsur pada Dinas Sosial DIY secara konsisten dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MUHAMMAD SETIADI, S.Pt., M.Acc.
NIP 19671004 199203 1 005

Tembusan:
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Lampiran 4. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun 2022

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS SOSIAL
ꦢꦶꦤꦱꦺꦴꦱꦶꦮꦺꦴꦱꦶꦤ꧀
Jl Janti-Banguntapan Yogyakarta Telepon (0274) 514932 Facsimile (0274) 587060
Website: dinsos.jogjaprov.go.id Email: dinsos@jogjaprov.go.id. Kode Pos 55198

TINDAK LANJUT LKjIP TAHUN 2022
DINAS SOSIAL DIY

No	Surat Inspektur DIY Nomor : 700/01055 tanggal 14 Maret 2023	Tindak lanjut
	Surat Inspektur DIY Nomor : 700/01055 tanggal 14 Maret 2023, perihal Laporan Hasil Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah pada Dinas Sosial DIY Tahun 2022 Rekomendasi : 1. Menerapkan manajemen kinerja berkelanjutan meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelapiran kinerja, dan evaluasi atas kinerja internal sehingga praktik baik budaya kinerja yang telah dilakukan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan. 2. Meningkatkan koordinasi internal serta kolaborasi dengan perangkat daerah terkait dalam rangka pencapaian sasaran strategis Dinas Sosial DIY, yaitu : terpenuhinya kebutuhan dasar, perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan perilaku bagi PMKS dan terwujudnya peningkatan kemampuan, partisipasi dan peran potensi sumber kesejahteraan sosial. 3. Melakukan Reviu internal lebih intensif dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Sosial DIY supaya menghasilkan laporan yang substansi dan redaksionalnya sesuai dengan pedoman penyusunan.	Menindak lanjuti Laporan Hasil Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah pada Dinas Sosial DIY Tahun 2022, Dinas Sosial DIY telah : 1. Dinas Sosial DIY berupaya memberikan pelayanan dengan lebih baik dari waktu ke waktu. Manajemen kinerja yang lebih baik dan lebih komprehensif telah membawa Dinas Sosial DIY pada pencapaian kategori Pelayanan Prima sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dan pencapaian nilai Reformasi Birokrasi terjadi peningkatan signifikan dari tahun 2022 sebesar 83,85 menjadi 93,13 pada tahun 2023. Pembangunan Zona Integritas sebagai wujud pelaksanaan dari Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan, maka pada 2023 Dinas Sosial DIY telah memulai dengan melakukan pencanangan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). 2. Meningkatkan Koordinasi internal serta kolaborasi dengan OPD terkait dalam rangka pencapaian sasaran strategis. Sasaran strategis Dinas Sosial DIY terkait terpenuhinya kebutuhan dasar, perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan perilaku bagi PMKS dan terwujudnya peningkatan kemampuan, partisipasi dan peran potensi sumber kesejahteraan sosial, pada tahun 2023 tercapai dengan melampaui target. Koordinasi internal dan kolaborasi dengan pihak eksternal dilakukan dengan melibatkan semua Bidang, Balai, Mitra Dinas, dan

No	Surat Inspektur DIY Nomor : 700/01055 tanggal 14 Maret 2023	Tindak lanjut
		Stakeholder terkait, sehingga strategi pencapaian dapat dirumuskan dan dilakukan. 3. Reviu internal dalam rangka penyusunan LKjIP agar sesuai pedoman penyusunan dilakukan secara berlapis mulai dari Sekertaris dan naik ke Kepala Dinas. Penyusunan LKjIP juga telah disesuaikan dengan pedoman yang ada dan selalu dikomunikasikan dengan Mitra pengampu urusan sosial pada Biro Organisasi Setda DIY.

Yogyakarta, 21 Maret 2022

KEPALA,

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DISSOS

ENDANG PATMINTARSIH, SH, M.SI
NIP. 196604041993032007

Lampiran 5. Prestasi/Penghargaan

1. Penghargaan sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori "Pelayanan Prima" Tahun 2023

A

panrb

Piagam Penghargaan

Diberikan Kepada

Dinas Sosial
Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Sebagai

Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
Kategori "Pelayanan Prima"
Tahun 2023

Jakarta, 21 November 2023
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi

H. Abdullah Azwar Anas, M.Si

2. Keterbukaan Informasi Badan Publik Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 sebagai Badan Publik Informatif

KOMISI INFORMASI DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PENGANUGERAHAN

KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023
Kategori **OPD PEMERINTAH DAERAH DIY**

Dinas Sosial DIY

Sebagai Badan Publik

INFORMATIF

Yogyakarta, 21 September 2023

Ketua

H. Moh. Hasyim, S.H., M.Hum.

3. Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Tahun 2023

OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN HASIL
PENILAIAN KEPATUHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

Pemerintah Daerah : Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta
Unit Layanan : Dinas Sosial
Periode Penilaian : Juni - Oktober 2023

DIMENSI INPUT
A.1. Kompetensi Pelaksana

No.	Indikator	Bobot	Nilai Konversi Bobot	Responden				Hasil Penilaian (%)
				1	2	3	4	
1	Pengetahuan tentang komponen standar pelayanan	12.22	2.67	80	20	80	60	52
2	Pengetahuan terkait tugas dan kewenangan jabatan	8.40	1.84	100	100	100	100	90
3	Pengetahuan tentang lembaga Ombudsman	4.58	1.00	100	60	80	80	72
4	Pengetahuan tentang bentuk-bentuk maladministrasi	4.58	1.00	100	100	100	100	90
5	Pengetahuan tentang rekomendasi Ombudsman	4.58	1.00	100	100	100	40	75
6	Pengetahuan tentang layanan yang ramah kelompok marginal/rentan	3.84	0.84	100	60	80	100	77
Kompetensi Pelaksana		38.20	8.35	93.60	65.59	89.19	77.61	72.58

DIMENSI INPUT
A.2. Sarana Prasarana

No.	Indikator	Bobot	Nilai Konversi Bobot	Hasil Penilaian (%)
1	Frekuensi Pengawasan Internal	8.06	1.76	100
2	Ketersediaan jumlah petugas sesuai dengan Analisis Beban Kerja (ABK)	8.06	1.76	80
3	Ketersediaan jaminan pelayanan	8.06	1.76	60
4	Ketersediaan jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	7.31	1.60	100
5	Ketersediaan instrumen evaluasi kinerja pelaksana	5.75	1.26	100
6	Ketersediaan dasar hukum atas standar pelayanan yang diterapkan	7.31	1.60	100
7	Ketersediaan sarana, prasarana, dan fasilitas bagi pengguna layanan	5.85	1.28	100
8	Ketersediaan sarana prasarana bagi pengguna dengan perlakuan khusus	5.85	1.28	100
9	Ketersediaan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat	5.55	1.21	100
Sarana Prasarana		61.80	13.50	92.17

DIMENSI PROSES
B. Standar Pelayanan

No.	Indikator	Bobot	Nilai Konversi Bobot	Produk		Hasil Penilaian (%)
				1	2	
1	Ketersediaan Persyaratan	9.00	2.91	100	100	100
2	Ketersediaan Sistem Mekanisme dan Prosedur	9.00	2.91	100	100	100
3	Ketersediaan Jangka waktu penyelesaian	10.66	3.45	100	100	100
4	Ketersediaan Biaya/Tarif	10.66	3.45	100	100	100
5	Ketersediaan Produk Pelayanan	9.00	2.91	100	100	100
6	Publikasi Maklumat pelayanan	3.53	1.14	100	100	100
7	Subtansi Maklumat Pelayanan	3.53	1.14	100	100	100
8	Pelayanan Khusus	7.96	2.58	100	100	100
9	Ketersediaan Visi, Misi Pelayanan	7.96	2.58	100	100	100
10	Ketersediaan Moto Pelayanan	7.96	2.58	100	100	100
11	Ketersediaan Atribut	7.96	2.58	100	100	100
12	Ketersediaan Pelayanan Terpadu	12.78	4.14	80	80	80
Standar Pelayanan		100.00	32.37	97.44	97.44	97.44

DIMENSI OUTPUT
C. Persepsi Maladministrasi

No.	Indikator	Bobot	Nilai Konversi Bobot	Hasil Penilaian (%)	Jumlah Responden
1	Penundaan berlarut	16.80	4.07	100	8
2	Permintaan imbalan	18.40	4.46	100	
3	Penyimpangan prosedur	18.40	4.46	100	
4	Tidak kompeten	14.40	3.49	98	
5	Tidak patut	12.00	2.91	100	
Persepsi Maladministrasi		80.00	19.39	99.55	

DIMENSI OUTPUT
C.2. SPM/IKM

No.	Indikator	Bobot	Nilai Konversi Bobot	Hasil Penilaian (%)
1	IKM/SPM	20.00	4.85	80
SPM/IKM		20.00	4.85	80.00

PEMERINTAH DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA